



KEMENTERIAN  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

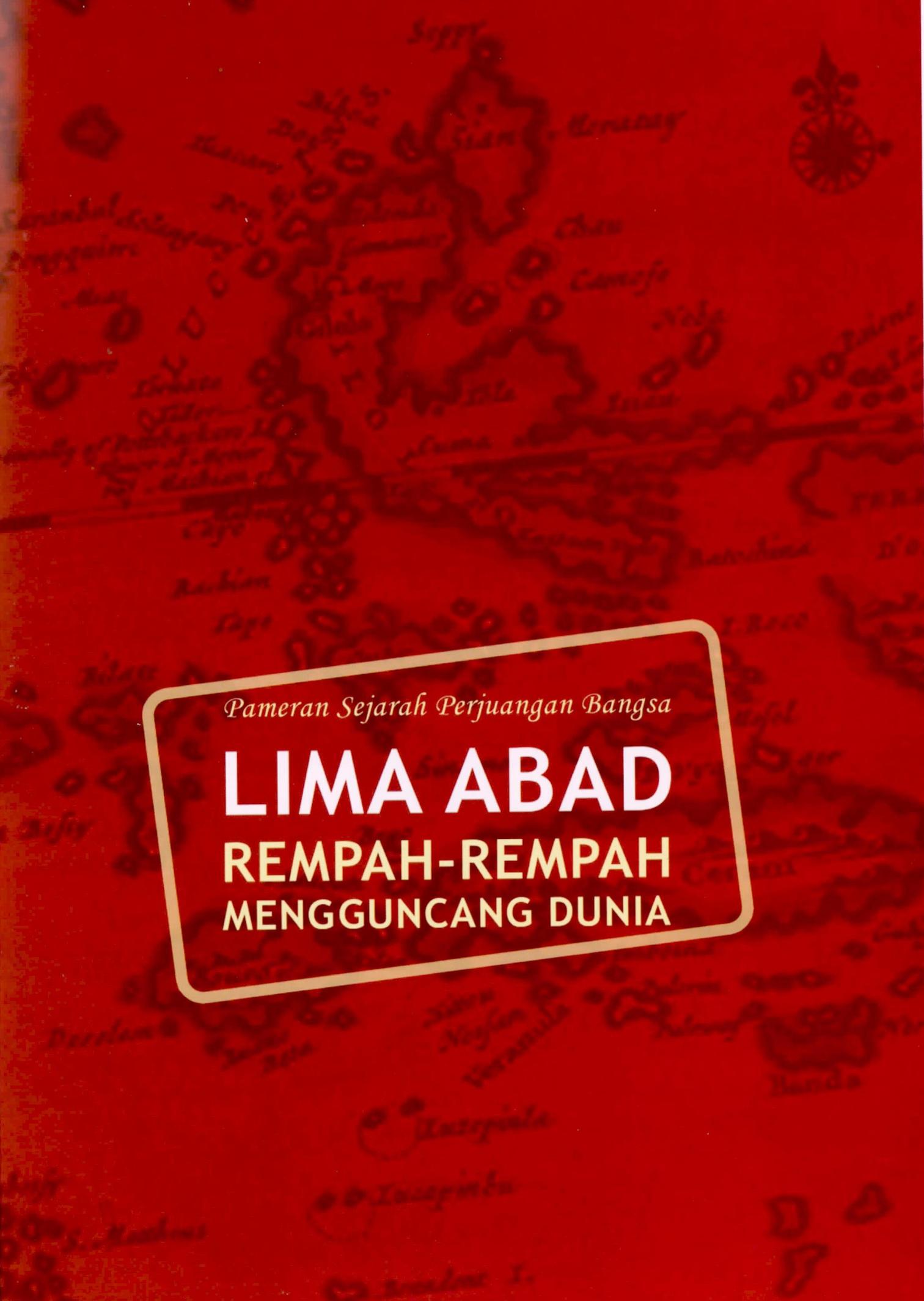
*Pameran Sejarah Perjuangan Bangsa*

# LIMA ABAD REMPAH-REMPAH MENGGUNCANG DUNIA



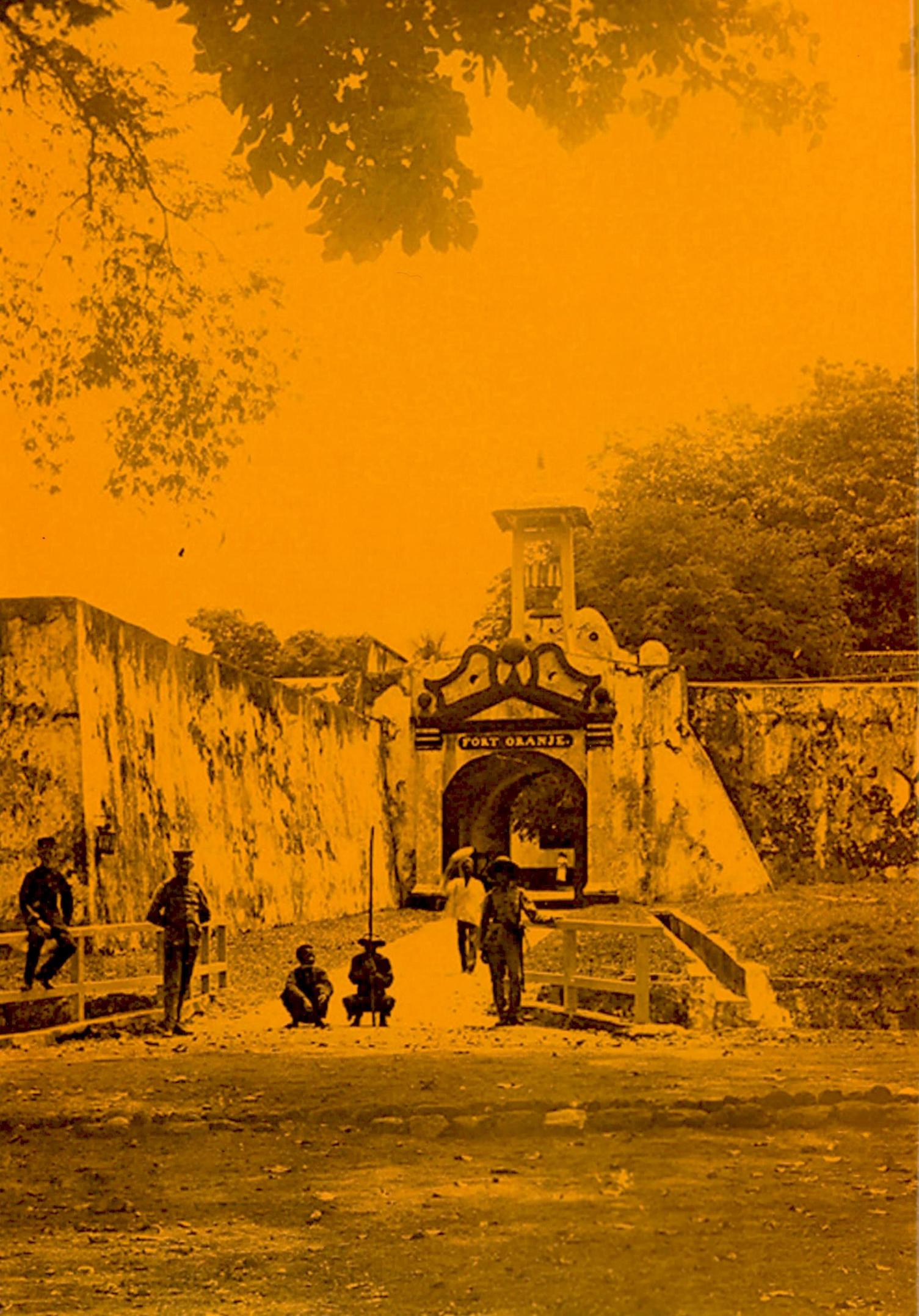
**BENTENG ORANJE  
GAMALAMA, TERNATE  
MALUKU UTARA  
1 - 5 AGUSTUS**

**2017**



*Pameran Sejarah Perjuangan Bangsa*

**LIMA ABAD  
REMPAH-REMPAH  
MENGGUNCANG DUNIA**



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyusun Katalog Pameran Bersama Sejarah Perjuangan Bangsa dengan tema "Lima Abad Rempah-Rempah Mengguncang Dunia".

Penyelenggaraan pameran ini sebagai media Museum untuk mendekatkan diri kepada masyarakat dalam menyebarkan informasi mengenai museum dan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Hadirnya pameran diharapkan mampu mengenalkan serta memperluas wawasan masyarakat terhadap museum dan Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia sehingga masyarakat semakin mengenal jati diri bangsa dengan mempelajari masa lalu yang mampu menumbuhkan rasa nasionalisme.

Pameran ini menampilkan informasi dari kurun waktu masa kedatangan bangsa Eropa sampai dengan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pameran ini dibagi menjadi 5 sub tema yaitu "Jalur Rempah-rempah : Pelayaran dan Perdagangan Nusantara", "Masa Pergerakan Nasional", "Organisasi Kepemudan dan Kongres Pemuda", "Proklamasi Kemerdekaan", dan "Menegakkan Negara Proklamasi".

Dengan adanya katalog ini kami harapkan dapat membantu pengunjung untuk memperdalam pengetahuan yang diperoleh dari materi pameran. Kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan katalog. Kami mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan .

Jakarta, Juli 2017

Panitia



## Sambutan

### Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya, sehingga kegiatan Pameran Bersama Sejarah Perjuangan Bangsa dengan tema “Lima Abad Rempah-rempah Mengguncang Dunia” dapat terselenggara dan terlaksana dengan baik.

Pameran Bersama Sejarah Perjuangan Bangsa yang dilaksanakan tanggal 1 - 5 Agustus 2017 merupakan ide dari UPT-UPT museum di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman menyambut baik kegiatan ini. Wujud dukungan kami dalam pameran ini, berupa pendudukan pameran, Seminar dan Belajar Bersama di Museum untuk pelajar SMP. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menyebarkan informasi mengenai museum dan sejarah perjuangan bangsa kepada masyarakat. Diharapkan kegiatan ini dapat rutin dilakukan setiap tahun.

Rentetan peristiwa dalam proses terbentuknya Indonesia tidak bisa terlepas dari kolonialisme yang terjadi di masa lalu. Kondisi geografis nusantara yang berada di titik temu jalur perdagangan dunia barat dan dunia timur, sekaligus daerah penghasil rempah-rempah menyebabkan bangsa Eropa berlomba-lomba untuk menguasai wilayah nusantara. Eksploitasi yang dilakukan oleh penjajah menimbulkan penderitaan rakyat dan perlawanan di berbagai daerah di Nusantara.

Perubahan bentuk perjuangan melawan penjajah ditandai dengan berdirinya organisasi modern pertama Boedi Oetomo pada 20 Mei 1908. Boedi Oetomo mempelopori berdirinya organisasi modern yang lain seperti Indische Vereniging, Sarekat Islam, Indische Partij, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama. Selain itu juga ada organisasi pemuda kedaerahan seperti Jong Java, Jong Batak Bonds, Jong Sumateranen Bonds, Jong Celebes, Jong Ambon dan lainnya. Semangat pemuda untuk menyatakan bahwa mereka adalah satu kesatuan tertuang dalam Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928 yang kita kenal sebagai Sumpah Pemuda.

Puncak perjuangan Bangsa Indonesia ditandai dengan dibacakannya Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia oleh Ir. Soekarno dan Moh. Hatta pada 17 Agustus 1945 yang menandakan bahwa Bangsa Indonesia adalah bangsa yang merdeka dan berdaulat. Namun demikian perjuangan untuk mempertahankan kedaulatan itu tidaklah mudah. Bangsa Indonesia harus menghadapi beragam persoalan baik dari

dalam maupun luar. Sampai akhirnya pada 17 Agustus 1950 terwujudlah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Melalui kegiatan pameran ini diharapkan semangat kejuangan dan keteladanan tokoh-tokoh pendiri bangsa ini bisa tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan generasi muda khususnya. Museum sebagai tempat menjaga dan menyampaikan benang merah memori kolektif antara masa lalu dengan masa kini harus bisa mengomunikasikan pesan yang terdapat pada koleksi itu kepada masyarakat. Museum berperan aktif dalam penyebaran informasi kesejarahan tersebut melalui kegiatan pameran guna pembentukan karakter dan jati diri bangsa.

Materi yang disajikan dalam pameran dirangkum dalam buku katalog pameran ini. Buku katalog ini diharapkan menjadi bahan publikasi dan informasi tentang Sejarah Perjuangan Bangsa "Lima Abad Rempah-Rempah Mengguncang Dunia" dan dapat tersebar luas kepada publik.

Kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan pelaksanaan pameran dan rangkaian kegiatan pendukungnya. Kami sangat berharap buku katalog ini membawa manfaat bagi masyarakat.

Jakarta, Juli 2017



Dr. Harry Widiyanto

NIP. 195807071985031004

## DAFTAR ISI

<b>JALUR REMPAH REMPAH: PELAYARAN DAN PERDAGANGAN NUSANTARA.....</b>	<b>1</b>
Mencari Surga Rempah Rempah.....	1
Perebutan Pengaruh dan Monopoli.....	2
Rakyat Tertindas: Perlawanan Lokal Melawan Portugis.....	3
Kedatangan Bangsa Belanda dan Lahirnya VOC.....	4
Keistimewaan VOC Berujung Penindasan.....	4
Mata Uang dan Surat Berharga VOC.....	5
Perdagangan Lokal.....	6
Perlawanan Lokal di Maluku.....	7
<b>MASA PERGERAKAN NASIONAL.....</b>	<b>9</b>
Bangkit dan Berkembangnya Kesadaran Nasional.....	9
Lahirnya Kesadaran Kebangsaan Nasional di Tanah Maluku.....	12
Dokter Lulusan STOVIA yang Berasal dari Maluku.....	13
<b>ORGANISASI KEPEMUDAAN DAN KONGRES PEMUDA.....</b>	<b>17</b>
Sejarah Sumpah Pemuda: Pertumbuhan Organisasi Kedaerahan sampai Kongres Pemuda I.....	17
Organisasi Kepemudaan dari Timur.....	18
Kongres Pemuda I.....	19
Organisasi Pemuda yang Muncul Setelah Kongres Pemuda I.....	20
Pembentukan Indonesia Muda.....	23
Wage Rudolf Supratman: Maestro Biola dan Pencipta Lagu Indonesia Raya.....	23
Tokoh-tokoh Jong Ambon dalam Kongres Pemuda II.....	26
<b>PROKLAMASI KEMERDEKAAN.....</b>	<b>31</b>
Strategi Infiltrasi Kawasan.....	31
Serangan Itu Dimulai: Kedatangan Jepang.....	32
Propaganda Jepang: Kerjasama Demi Indonesia Merdeka.....	33
Romusha dan Revolusi Cinta Tanah Air.....	34
Pemberontakan PETA: Puncak Kemarahan.....	34
Revolusi yang Gagal.....	35
Jepang Terdesak, Kemerdekaan Semakin Dekat.....	37
Detik-Detik Proklamasi.....	39
Indonesia Merdeka: Puncak Pengorbanan Seluruh Rakyat Indonesia.....	40
Situasi Proklamasi di Ternate: Maluku Utara.....	42
Kembalinya Sultan Ternate dari Pengasingan.....	44
Tokoh Proklamasi dari Maluku.....	46
Bandaneira: Terpenjara Raga, Kemerdekaan Akal (Profil Drs. Moh. Hatta).....	48
<b>MENEGAKKAN NEGARA PROKLAMASI.....</b>	<b>53</b>
Kilasan Peristiwa 1945-1949: Menegakkan Negara Proklamasi.....	53
Kabinet Parlementer Pertama.....	53
Yogya, Ibukota Pemerintahan RI.....	54
Kabinet Sjahrir II.....	54
Konferensi Malino.....	55
Perundingan Linggarjati.....	55
Pembentukan dan Pembubaran Negara Indonesia Timur (NIT).....	56

Pembentukan Kabinet Amir Syarifudin.....	57
Perundingan Renville.....	57
Perundingan Kaliurang.....	58
Runtuhnya Kabinet Amir dan Naiknya Moh Hatta sebagai Perdana Menteri.....	58
Pemberontakan PKI di Madiun dan Agresi Militer Belanda Kedua.....	58
Serangan Umum 1 Maret 1949.....	60
Perundingan Roem Royen.....	60
Konferensi Inter Indonesia.....	61
Konferensi Meja Bundar (KMB).....	62
Pengakuan Kedaulatan.....	62
Pembentukan dan Pembubaran Republik Maluku Selatan (RMS).....	63
Kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).....	63
Kunjungan Soekarno ke Maluku.....	64





**Setangkai Bunga dan Daunnya**

Cat Minyak di Kanvas

35 x 30 cm

Koleksi Museum Basoeki Abdullah

# JALUR REMPAH-REMPAH: PELAYARAN DAN PERDAGANGAN NUSANTARA

## Jalur Pelayaran dan Perdagangan di Nusantara

Indonesia atau Nusantara di masa lalu memang telah lama dikenal sebagai jalur pelayaran dan perdagangan dunia, paling awal sejak masa prasejarah sekitar 1700 SM. Kerajaan-kerajaan terdahulu seperti Majapahit, Sriwijaya, Singosari dan lain sebagainya berupaya memperluas kekuasaannya untuk berpengaruh di jalur-jalur perdagangan Nusantara. Menguasai jalur perdagangan bukan saja semata-mata faktor ekonomi, namun lebih luas dari itu juga beragam kepentingan ada di sepanjang jalur perdagangan. Kekuasaan politik, diplomasi budaya, dan persebaran religi merentang sepanjang jalur yang dilalui tersebut.



1. Peta Nusantara Abad ke-16

tempat di Nusantara. Dengan begitu, mereka juga berinteraksi dengan penduduk lokal Nusantara untuk terlibat dalam perdagangan. Kegiatan ini berlangsung lama sehingga mengakibatkan terjadinya akulturasi budaya di antara masyarakat lokal yang berinteraksi dengan orang-orang asing tersebut. Disinilah bahasa Melayu Riau menjadi bahasa pergaulan *lingua franca* yang dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar saat berinteraksi.

Letak geografis Nusantara yang menjadi titik temu antara dunia barat (India, Timur Tengah, Eropa) dan dunia timur (Tiongkok) memungkinkan untuk itu. Selat Malaka saat itu menjadi satu-satunya pintu gerbang penghubung dunia dari barat menuju timur serta sebaliknya. Pedagang-pedagang dari dunia barat dan timur umumnya berlayar mengarungi Selat Malaka untuk mencapai ke tempat tujuan. Terkadang mereka tidak langsung ke tempat tujuan tetapi singgah terlebih dahulu ke beberapa

## Mencari Surga Rempah-Rempah

Apa yang menyebabkan para pedagang asing tertarik datang ke Nusantara? Tidak lain karena rempah-rempah. Rempah-rempah, walau banyak jenisnya tetapi yang paling banyak dicari orang adalah cengkeh, pala (termasuk bunganya) dan lada. Ada bukti bahwa Nusantara telah terhubung dengan dunia luar karena daya tarik rempah paling tidak sejak 1700 SM, sebagaimana bukti-bukti arkeologis di Terqa, suatu situs Mesopotamia (kini Syria), di mana ditemukan jambangan berisi cengkeh di gudang dapur rumah. Pohon cengkeh, lada dan pala tidak tumbuh di tempat lain,

hanya di pulau-pulau kecil di sebelah barat Halmahera, Ternate, Moti, Makian dan Bacan. Demikian pula pohon pala juga tumbuh di Pulau Banda.

Mengapa rempah-rempah diminati oleh Bangsa Eropa? Benua Eropa yang mengalami musim dingin membutuhkan unsur penghangat dalam masakan yang mereka makan. Konstantinopel merupakan wilayah kekuasaan Romawi sekaligus tempat pertemuan barang-barang dari wilayah Asia yang memasarkan komoditi yang dibutuhkan oleh bangsa Eropa. Namun situasi berubah ketika Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Usmaniyah pada 1453. Pasar tersebut otomatis dimonopoli Bangsa Turki yang menyulitkan bangsa-bangsa di Eropa mendapatkan rempah-rempah.



2. Peta Kepulauan Maluku



Aroma rempah ini sampai juga ke Eropa, terutama bangsa Portugis, Spanyol dan Belanda untuk mencari sendiri sumber penghasil rempah-rempah tersebut. Mereka mencari jalan menuju ke sana dengan caranya, berbekal peralatan navigasi seperti peta dan kompas. Maka, dimulailah penjelajahan samudera untuk mencari wilayah baru. Perjanjian Tordesillas antara Spanyol dan Portugis yang ditandatangani pada 1494 menegaskan bahwa belahan bumi bagian barat milik Spanyol, sedangkan bagian

timur menjadi milik Portugis. Spanyol lebih dulu tiba di Nusantara dan menemukan tempat penghasil rempah di Kepulauan Maluku.

## Perebutan Pengaruh dan Monopoli



Perebutan daerah koloni antara Spanyol dan Portugis semakin sengit. Maka diadakanlah kesepakatan berikutnya, Perjanjian Zaragoza yang diratifikasi pada 1529. Dalam perjanjian ini dicapai hasil yang lebih rinci, yaitu: [1] Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memusatkan kegiatan di Filipina, [2] Portugis tetap melakukan aktivitas perdagangan di Maluku. Sebelum perjanjian itu diratifikasi, Portugis ternyata sudah bercokol di tempat lain di Nusantara, yaitu di Sunda Kalapa, Jawa. Portugis ketika itu mengadakan perjanjian dengan Kerajaan Sunda, ditandatangani pada 21 Agustus 1522. Isi pokok perjanjian antara lain: [1] membangun persahabatan antara kedua pihak, [2] Portugis diberi hak monopoli perdagangan, [3] Portugis diizinkan mendirikan benteng pertahanan untuk memerangi musuh Sunda, [4] Raja Sunda bersedia memberikan 1000 karung lada kepada Portugis. Perjanjian ini ditandai dengan pendirian tugu batu, disebut **padrão**, sebagai cara untuk menyatakan kepemilikan atas suatu wilayah.

3. Padrão perjanjian antara Kerajaan Sunda dan Portugis



4 Naskah Perjanjian Saragosa

Dalam catatan perjalanan pedagang-pedagang Portugis, mereka menyebut Maluku dengan Pulau Rempah-rempah. Aktivitas perdagangan di Maluku khususnya Ternate tidak hanya transaksi jual-beli rempah-rempah antara Portugis dan penduduk lokal melainkan juga dengan negara-negara lain.

Banyak pelawanan rakyat yang harus dihadapi Portugis, hal itu disebabkan Portugis melakukan monopoli yang sebelumnya tidak dilakukan di Asia. Akibatnya, rakyat Maluku dipaksa menjual hasil perkebunannya, hanya kepada Portugis. Harga pembelian ditetapkan menurut kehendak Portugis. Barang dagangan tersebut dibawa langsung dari Maluku menuju Lisabon melalui Malaka,

kemudian melalui Goa dan Tanjung Harapan. Hal ini mematikan perdagangan dan pelayaran yang sifatnya bebas dan telah lama berlangsung.

## Rakyat Tertindas: Perlawanan Lokal Melawan Portugis



5. Ilustrasi Kedatangan Portugis di Ternate

Kekuasaan Portugis di Maluku yang eksploitatif mendorong bangkitnya perlawanan rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Hairun. Namun dengan dalih untuk berunding, Sultan Hairun akhirnya ditangkap kemudian dibunuh pada 1570. Pengganti Sultan Hairun, yaitu Sultan Baabullah, melanjutkan perlawanan terhadap bangsa Portugis. Di bawah komando Sultan Baabullah, pada 28 Desember 1577, bersama rakyat Ternate berhasil mengusir orang-orang Portugis dari Maluku. Orang-orang Portugis dengan sangat terpaksa menyingkir ke pulau lain di dekat Thula. Namun di sini pun mereka mendapat perlawanan dari orang-orang Jawa dan Melayu yang jadi saingan Portugis dalam perdagangan rempah-rempah. Selanjutnya, orang-orang Portugis menyingkir ke Ambon dan mendirikan benteng di sana.



6. Ilustrasi Situasi Gladak Kapal Belanda di Tengah Lautan

Pada 1599, orang-orang Portugis kembali ke Maluku dengan armada yang besar. Mereka hendak membalas dendam terhadap orang-orang Maluku yang telah mengusir mereka dari kedudukan-kedudukan mereka di sana. Hitu dapat mereka kuasai kembali, tetapi di Ternate mereka dipukul mundur dan terpaksa kembali ke Malaka. Pembalasan dendam ini lebih memperhebat lagi kebencian orang Maluku terhadap orang Portugis. Maka

ketika orang Belanda datang pada 1605, dimana orang Belanda merupakan musuh orang Portugis juga, disambut dengan baik. Dengan mudah Belanda dapat memperoleh pangkalan di Ambon, Ternate, Tidore dan Halmahera, sebuah bumerang bagi rakyat pribumi di masa yang akan datang.

## Kedatangan Bangsa Belanda dan Lahirnya VOC

Pada Juni 1596 Cornelis de Houtman memimpin armada kapal-kapal kongsi dagang Belanda memasuki wilayah Nusantara dimana awal kedatangan mereka adalah berlabuh di wilayah Banten. Reaksi rakyat Banten saat pertama kali menerima kedatangan mereka adalah rasa tidak suka yang berujung pengusiran armada dagang Belanda tersebut, karena sikap yang ditunjukkan oleh para pedagang adalah sikap angkuh, memandang rendah dan kasar. Pada 1598 kongsi dagang Belanda datang kembali ke Banten di bawah pimpinan Jacob Van Neck. Sultan Banten Abdul Mufakir mengizinkan mereka untuk melakukan kegiatan perdagangan. Keberadaan kongsi dagang Belanda gelombang pertama di Banten ini kemudian disusul dengan kehadiran kongsi-kongsi dagang Belanda lainnya hingga akhirnya terjadi persaingan di antara mereka. Untuk menghindari kerugian yang diakibatkan persaingan tersebut, akhirnya Pangeran Maurits menugaskan Johan van Olden Barnevelt untuk menggabungkan kongsi-kongsi dagang Belanda. Pada 20 Maret 1602 berdiri Verenigde Oost-indische Compagnie (VOC) atau Persekutuan Dagang Hindia Timur yang dilengkapi dengan Akta Oktroi.



7. Ilustrasi Pendaratan Kongsi Dagang Belanda

VOC inilah yang pada akhirnya berhasil menanamkan kekuasaan awalnya di Nusantara dengan sistem politik dagang monopoli yang dianutnya. Cepatnya keberhasilan ekspansi dagang dan politik Belanda di seluruh wilayah kerajaan-kerajaan Nusantara, tampaknya bukan saja semata-mata karena "taktik pecah belah" (*divide et impera*), melainkan juga karena adanya potensi konflik antar kerajaan itu sendiri. Hal inilah yang dipelajari oleh VOC sebelum masuk dan mulai menjalankan aksinya.

## Keistimewaan VOC Berujung Penindasan

Praktik VOC yang monopolistik mengakibatkan penduduk menderita dan campur tangan ke dalam kerajaan telah menimbulkan ketidak-senangan dan menimbulkan perlawanan-perlawanan terhadap VOC. VOC memiliki hak istimewa yaitu Hak Ekstirpasi dan Hak Oktroi. Hak Ekstirpasi adalah hak memusnahkan kebun-kebun milik rakyat yang berlimpah. Untuk mempertahankan monopoli ini, maka berkali-kali VOC mengadakan "Pelayaran Hongi", yaitu serangan-serangan terhadap penduduk yang menyalahi peraturan. Korban pertama adalah Banda (1625). Seluruh

penduduk dibunuh, semua kebun yang ada dimusnahkan, sedangkan yang masih hidup terus diangkut ke Batavia. *Sedangkan Akta Oktroi* menjadikan VOC memiliki hak-hak seperti monopoli perdagangan, mencetak mata uang, mengangkat dan memperhentikan pegawai, mengadakan perjanjian dengan raja-raja, membentuk angkatan perang, membuat undang-undang dan peraturan, serta membentuk pengadilan dan mahkamah agung. Hak istimewa tersebut dimanfaatkan untuk mengeruk keuntungan, rakyat dipaksa menjual rempah-rempah dengan harga yang sudah ditetapkan dan diwajibkan menyerahkan hasil bumi sebagai pajak. Kebijakan VOC tersebut menjadikan rakyat menderita dan melarat.



8. Ilustrasi Perlawanan Rakyat Maluku terhadap VOC

Kebiasaan Pelayaran Hongi itu menimbulkan kemarahan yang luar biasa pada penduduk Maluku. Di bawah kepemimpinan Sultan Ternate maka berkobarlah peperangan, antara 1635 – 1743, yang berakhir dengan jatuhnya Kesultanan Ternate. Sementara itu Ambon yang tadinya membantu VOC, berbalik melawan Belanda yang tidak mengenal rasa terima kasih dan memperlakukan orang-orang Ambon seperti budak-budak. Peperangan Ambon ini baru berakhir pada 1646, yaitu setelah pertahanan Hitu yang terakhir di Gunung Kapaha hancur. Pada 1650 berkobar lagi perang melawan Belanda, kali ini dimulai di Ternate tetapi berpusat di Ambon, di mana terdapat pertahanan yang luar biasa kuat di Assaudi. Pada 1655 perlawanan ini dapat dipatahkan oleh Belanda.

## Mata Uang dan Surat Berharga VOC



9. Koin Peninggalan VOC

Dalam transaksi perdagangan, Kompeni Belanda banyak mencetak mata uang, terutama yang berlogo VOC, terbuat dari emas, perak dan tembaga dengan berbagai satuan nilai seperti *ducatoon*, *rijksdaalder*, *stuiver*, *doit*, *gulden*, yang dicetak di berbagai provinsi di Belanda yang berlaku juga di daerah koloninya. Ketika Kompeni Belanda mengalami kebangkrutan dan akhirnya bubar pada 1799, uang-uang VOC tetap masih bisa digunakan setidaknya 10 tahun ke



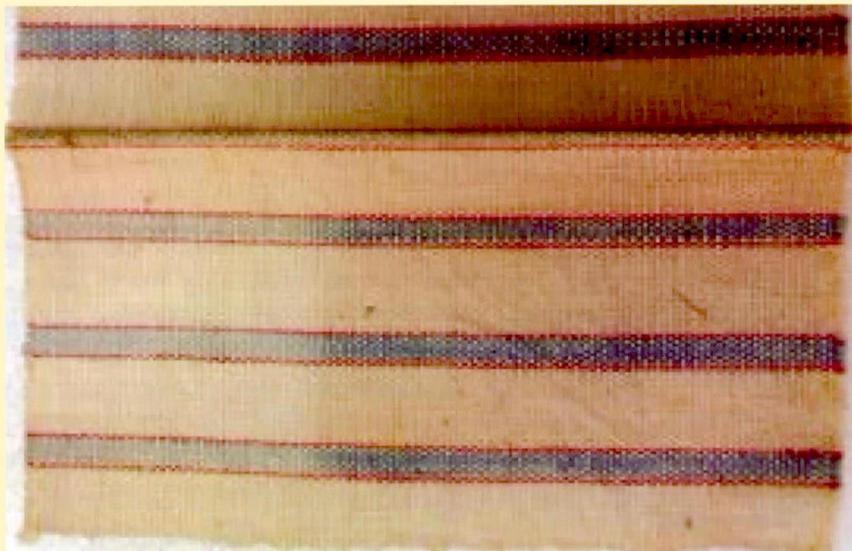
10. Surat Berharga dengan Cap Berlogo VOC

depan. Memang, masih terlihat uang-uang logam berlogo VOC sampai 1809, tetapi ini dicetak di Batavia, tempat yang jauh dari pusat pemerintahan di negeri Belanda. Maka tidak heran apabila ditemukan uang-uang VOC yang masih berlaku di Maluku karena “terpencilnya” wilayah ini dari pusat kekuasaan VOC di Batavia, apalagi di negeri Belanda, walau bentuk pemerintahan sudah silih berganti, hingga menjadi di bawah Kerajaan Belanda atau pemerintahan Hindia-Belanda.

Yang menarik, di wilayah Kepulauan Maluku ini beredar Surat Berharga dengan cap berlogo VOC dengan tanda khusus. Jika di atas logo ada huruf ‘A’ berarti Surat Berharga itu diterbitkan di Amboina (Ambon) dan jika ada huruf ‘T’ berarti diterbitkan di Ternate. Surat Berharga macam cek ini mungkin digunakan dalam transaksi perdagangan yang bernilai besar, contohnya 200 Rijksdaalders dan dapat ditukarkan dengan “uang keras” atau uang logam perak di Batavia. Surat Berharga ini berlaku untuk wilayah Ambon, Banda dan Ternate.

## Perdagangan Lokal

Dalam transaksi perdagangan, ternyata rakyat Maluku tidak hanya berdagang dengan bangsa-bangsa Eropa yang culas, memonopoli dan mengeksploitasi mereka ini. Mereka juga berdagang dengan orang-orang dari daerah lain seperti Jawa, Melayu, Bugis, Makassar dan Buton (Wolio). Orang Buton, yang kerajaannya berada di Sulawesi Tenggara, tentunya ikut terlibat dalam transaksi perdagangan lokal di Maluku yang terkenal dengan rempah-rempahnya. Unikny alat pembayaran yang mereka gunakan adalah secarik kain katun yang disebut “*kampua*”. Sebagai uang yang berpengaruh karena banyak digunakan dalam transaksi perdagangan, pemerintah Hindia-Belanda melihat ini sebagai suatu ancaman. Dengan menukar *kampua* dari warga dengan uang Belanda, lambat laun peredaran *kampua* berkurang.



11. Kampua

## Perlawanan Lokal di Maluku

Pemerintah Hindia-Belanda yang mengendalikan wilayah jajahan sejak 1815 menjalankan eksploitasi besar-besaran di segala bidang. Dalam bidang politik, pengaruh kekuasaan Belanda makin kuat, yang mengakibatkan terdesaknya penguasa-penguasa pribumi. Mereka dijadikan sebagai pembantu pemerintahan. Mereka yang semula berdaulat atas daerahnya, kekuasaannya dikurangi, hal ini tentunya membuat turunnya derajat mereka. Oleh karena itu tidak heran apabila perlawanan terhadap pemerintah kolonial banyak digerakkan oleh penguasa pribumi yang tidak senang kepada Belanda. Pada awal abad XIX perlawanan terhadap pemerintah kolonial meluas ke seluruh Nusantara.

Pada 1817, Thomas Matulesy atau dikenal dengan nama Pattimura memimpin pemberontakan di Saparua dan berhasil menduduki benteng Belanda, Duurstede. Residen Belanda ikut tewas dalam pertempuran itu. Perlawanan meluas ke Ambon, Pulau Seram dan pulau lainnya. Akhirnya Pattimura dapat dilumpuhkan dan dihukum gantung pada Desember 1817. Dalam perlawanan melawan Belanda terdapat juga wanita pejuang bernama Christina Martha Tiahahu. Ia tertawan dan meninggal dalam perjalanan ke Pulau Jawa.



5. Thomas Matulesy ( Pattimura )  
(Dokumen Museum Basoeki Abdullah)



Lambang Boedi Oetomo



## MASA PERGERAKAN NASIONAL

### Bangkit dan Berkembangnya Kesadaran Nasional



13. Lukisan Masa Peralihan Perjuangan Fisik ke Masa Pergerakan Nasional  
(Koleksi Museum Kebangkitan Nasional)



14. Lukisan pelaksanaan Politik Etis di Indonesia  
(Koleksi Museum Kebangkitan Nasional).

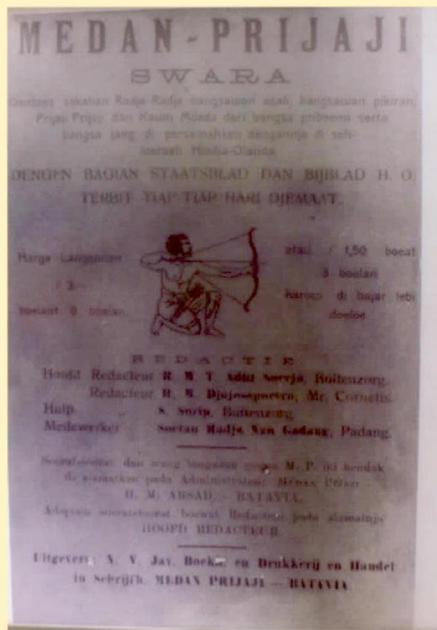
Setelah masa perjuangan fisik berakhir, perjuangan bangsa Indonesia memasuki masa pergerakan nasional, dimana perjuangannya beralih ke organisasi modern. Masa ini merupakan masa dimana bangkitnya rasa dan semangat persatuan, kesatuan, nasionalisme serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Hal tersebut merupakan dampak dari pelaksanaan Politik Etis oleh Belanda, terutama dalam bidang pendidikan yang secara tidak langsung telah melahirkan kaum intelektual pribumi yang menjadi penggagas pergerakan nasional.

Kaum intelektual ini, dengan tingkat pendidikan yang dimilikinya, mempunyai pandangan, cita-cita dan nilai baru terhadap perubahan sosial tanpa melupakan kebudayaan tradisionalnya. Mereka yang terdidik inilah yang kemudian menjadi agen pembaharuan dan pelopor pergerakan nasional. Dengan pengaruh gagasan-gagasan modern, mereka menyadari bahwa

perjuangan untuk memajukan bangsa Indonesia harus dilakukan dengan mendirikan organisasi modern yang digerakkan oleh para pemuda.

Pada awal abad 20 para kaum intelektual pribumi memperjuangkan cita-cita pembebasan tersebut dengan berbagai macam cara seperti mendirikan surat kabar, mendirikan perkumpulan, dan membentuk organisasi modern sebagai sarana komunikasi untuk mengumpulkan kekuatan rakyat. Pers atau media komunikasi memegang peranan penting dalam menyadarkan rakyat Indonesia dalam menempuh perjuangan. Seiring dengan tumbuhnya kesadaran nasional, pers telah dimanfaatkan

sebagai sarana untuk menyebarkan cita-cita mencapai kemerdekaan. Selain itu, pers juga diusahakan sebagai alat untuk memperkuat cita-cita kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Pada masa pergerakan nasional pers terbit di bawah pimpinan para tokoh dan perintis pejuang kemerdekaan.



15. Beberapa surat kabar yang didirikan pada masa pergerakan nasional (Koleksi Museum Kebangkitan Nasional)

Sementara itu, sejak didirikannya sekolah bagi anak-anak dari keturunan Belanda dan bumiputera kelas atas, di kalangan pribumi pun tumbuh kesadaran bahwa mereka pun harus mendapatkan pendidikan untuk memperjuangkan nasib bangsanya. Kegagalan pada masa perjuangan fisik dijadikan sebagai pembelajaran untuk menyusun strategi perlawanan selanjutnya. Dengan mendirikan organisasi-organisasi tersebut mereka dapat menularkan berbagai paham dan ideologi kepada rakyat.



16. Suasana kegiatan belajar mengajar di STOVIA (Koleksi Museum Kebangkitan Nasional).



**17. Wahidin Soedirohoesodo duduk bersama pelajar-pelajar STOVIA (Koleksi Museum Kebangkitan Nasional)**



**18. Para pendiri Boedi Oetomo (Koleksi Museum Kebangkitan Nasional)**



**19. Lambang Boedi Oetomo**

Pada awalnya, berdirinya organisasi ini tidak ditujukan hanya untuk perlawanan terhadap kaum penjajah, melainkan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang mengalami penderitaan akibat penjajahan. Namun pada akhirnya, organisasi tersebut bertujuan untuk mewujudkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal inilah yang menjadi faktor awal berdirinya berbagai macam organisasi pergerakan nasional di Indonesia.

Masa pergerakan nasional sendiri ditandai dengan berdirinya Boedi Oetomo sebagai organisasi nasional yang pertama. Boedi Oetomo merupakan sebuah organisasi pelajar yang didirikan oleh dr. Sutomo dan para mahasiswa STOVIA (School tot Opleiding voor Inlandsche Arsten) yaitu Goenawan, dr. Tjipto Mangoenkoesoemo, Soeraji serta R.T. Ario Tirtokusumo, di Jakarta pada 20 Mei 1908. Organisasi ini berdiri atas gagasan dari dr. Wahidin Soedirohoesodo, seorang dokter lulusan STOVIA yang sering berkeliling di kota-kota besar di Pulau Jawa untuk mengkampanyekan gagasannya mengenai bantuan dana bagi pelajar-pelajar pribumi berprestasi yang tidak mampu untuk melanjutkan sekolah.

Boedi Oetomo bersifat sosial, ekonomi, kebudayaan serta tidak bersifat politik. Walaupun ruang lingkup kegiatan Boedi Oetomo terbatas pada golongan terpelajar dan wilayahnya hanya meliputi Jawa, Madura dan Bali, akan tetapi Boedi Oetomo menjadi tonggak awal kebangkitan nasional. Pendirian Boedi Oetomo dapat disebut sebagai cikal bakal tumbuhnya semangat nasionalisme.

Lahirnya Boedi Oetomo menandai terjadinya perubahan bentuk perjuangan dalam mengusir penjajah, perjuangan yang selama ini bersifat kedaerahan berubah menjadi bersifat nasional dengan tujuan mencapai Indonesia merdeka. Perjuangan mengusir penjajah yang semula hanya mengandalkan kekuatan fisik dan bergantung pada seorang pemimpin, diganti dengan perjuangan baru yang memanfaatkan kekuatan pemikiran. Perubahan bentuk perjuangan ini menjadikan usaha untuk mengusir penjajah terus berkesinambungan, karena tidak bergantung pada satu orang pemimpin.



20. Pengurus Indische Vereeniging (Perhimpunan Indonesia).

Selain itu, Boedi Oetomo juga memelopori perjuangan organisasi, karena organisasi-organisasi pergerakan yang muncul pada masa berikutnya memiliki keterkaitan dengan Boedi Oetomo. Perhimpunan Indonesia, Sarekat Islam, *Indische Partij*, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Partai Nasional Indonesia dan Tri Koro Dharmo merupakan organisasi-organisasi yang lahir setelah menjalin interaksi dengan Boedi Oetomo. Meskipun memiliki

prinsip dan ideologi yang berbeda-beda, organisasi-organisasi tersebut memiliki satu tujuan yang sama yaitu meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dan mencapai Indonesia yang merdeka.

Perjuangan melalui jalur organisasi ini mampu menggoyahkan kestabilan pemerintah Belanda pada saat itu. Organisasi-organisasi tersebut dapat mempersatukan visi maupun misi kebangsaan sebagai dampak dari politik etis. Dampak tersebut memberikan wawasan kebangsaan dan memajukan pengetahuan umum bagi pribumi yang membuahakan kesadaran untuk kemerdekaan bangsa Indonesia.

## Lahirnya Kesadaran Kebangsaan Nasional di Tanah Maluku



21. Masyarakat Maluku dalam suatu perkumpulan

Beberapa waktu kemudian setelah Boedi Oetomo didirikan, di Maluku sendiri muncul beberapa organisasi pemuda kedaerahan sebagai bentuk kesadaran akan kebangsaan nasional. Organisasi yang pertama adalah Wilhelmina yang didirikan oleh J.P. Risakotta. Organisasi ini beranggotakan orang-orang Ambon. Tujuan dari organisasi ini adalah untuk menyatukan kepentingan masyarakat Ambon, memajukan pendidikan dan mengupayakan beasiswa. Selain itu,

ada pula *Ambonsch Bonds Studiefonds* yang didirikan oleh Willem Karel Tehupeiori pada 1909. *Ambonsch Bonds Studiefonds* merupakan pusat beasiswa yang bertujuan untuk mengupayakan anak-anak muda Ambon dapat memperoleh bantuan keuangan melalui yayasan pendidikan. Sementara itu kesadaran kebangsaan dan politik di Maluku Utara sendiri dimulai dengan berdirinya Budi Mulia pada 1919. Budi Mulia adalah sebuah organisasi sosial budaya dan pemberdayaan ekonomi, yang diprakarsai para pegawai sipil dan tokoh-tokoh masyarakat lokal. Budi Mulia mengalami pertumbuhan pesat dalam keanggotaan, terutama di kalangan kaum

buruh dan para pengusaha kecil, pedagang sayur dan buah, dan rakyat umum. Organisasi ini dipimpin oleh beberapa tokoh seperti Hamid Assar dan Gondhojowono.

Dalam kegiatannya, Budi Mulia bergerak dalam bidang pendidikan. Melalui kursus-kursus yang diselenggarakannya, organisasi ini mendidik para pemuda dan anggotanya di bidang sosial budaya dan pemberdayaan ekonomi dan politik. Akan tetapi dalam implementasinya, pendidikan politik memperoleh porsi besar dibandingkan dengan bidang sosial budaya dan ekonomi. Pada permulaan berdirinya, Budi Mulia dengan kental memperlihatkan dirinya sebagai organisasi sosial ekonomi yang bertujuan memberdayakan ekonomi rakyat kecil.

Seiring dengan perkembangannya, Budi Mulia dianggap sebagai organisasi yang beraliran kiri. Terlebih lagi ketika Hamid Assar dan Gondhojowono yang merupakan motor penggerak Budi Mulia ditangkap, organisasi ini pun menjadi lemah. Beberapa tokoh masyarakat setempat mencoba untuk menghidupkan kembali Budi Mulia dan memulihkan kinerjanya seperti pada masa awal berdirinya namun tidak berhasil, sampai akhirnya organisasi ini bubar karena ditinggalkan oleh para pengikutnya.

## Dokter Lulusan STOVIA yang Berasal dari Maluku

### 1. *Jonas Andreas Latumeten*

Seorang pemuda asal Desa Rutong, Ambon. Melalui *Schakelschool* (sekolah penghubung untuk menghubungkan pengajaran di sekolah bumi putera dengan pengajaran barat), Latumeten lulus tes masuk ke ELS (*Europesche Lagere School*) yaitu Sekolah Dasar untuk anak-anak Belanda. Karena kepandaian dan kecerdasannya, ia dapat mengikuti tes masuk STOVIA dan berhasil meraih gelar dokter. Setelah lulus dari STOVIA, Latumeten kembali ke Ambon dan menikah dengan Leentje Jacomina Tehupeiry. Setelah dikaruniai seorang putra, ia kembali ke Jakarta dan memulai karirnya sebagai dokter.

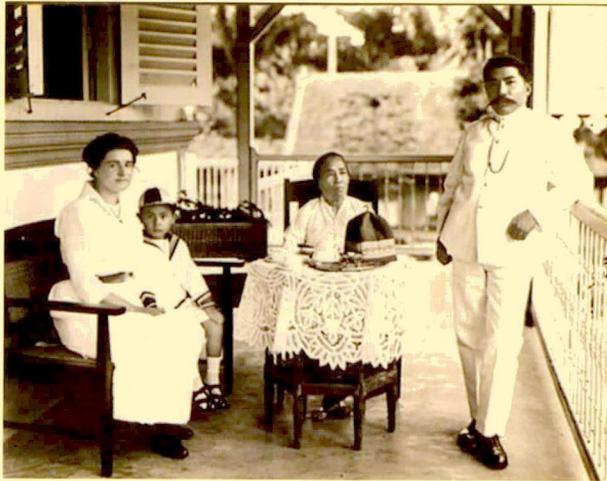


22. Jonas Andreas Latumeten (duduk kedua dari kiri) dengan beberapa siswa STOVIA pendiri Boedi Oetomo (Koleksi Museum Kebangkitan Nasional).

Indonesia. Oleh karena aktivitas politiknya itu, ia dianggap berbahaya oleh Belanda dan akibatnya ia dikembalikan ke Indonesia pada 1924 untuk kemudian diasingkan ke Sabang. Pada 1929 Latumeten dikembalikan dari pengasingannya dan kemudian diserahi tugas sebagai direktur rumah sakit jiwa di Bogor. Ia kemudian dihargai sebagai pejuang dan perintis kemerdekaan.

Ia kemudian ditugaskan ke Malang dan mengasuh Rumah Sakit Jiwa di Lawang. Di samping bekerja sebagai dokter, Latumeten secara diam-diam juga aktif dalam anggota pergerakan pemuda (*Jong Ambon Nerbond*). Karena prestasinya dalam bidang medis sangat baik, maka pada 1922 ia dikirim ke Belanda untuk mendalami pengetahuan di bidang Psichiatri (Penyakit Jiwa). Di Belanda ia bekerja sama dengan teman-temannya dalam organisasi Perhimpunan

## 2. Willem Karel Tehupeiry



23. Willem Karel Tehupeiry bersama dengan keluarganya.

Lahir pada 1883 di Ema, Pulau Ambon. Ia dikenal sebagai anak yang tekun dan cerdas, sehingga mampu menyelesaikan pendidikan dasar dengan nilai yang sangat baik. Bersama dengan kakak laki-lakinya yang bernama Johannes Everhardus, ia memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di STOVIA hingga lulus pada 1902. Setelah lulus, tugas pertamanya adalah menjadi dokter di sebuah penjara di Medan dan berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Oleh karenanya, pemerintah Belanda

kemudian menugaskannya ke daerah perkebunan Deli, untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada kuli kebun yang berasal dari Jawa dan Cina.

Adanya perlakuan diskriminatif terhadap dokter bumi putera, memicu semangat Willem untuk melanjutkan pendidikan dokternya ke Belanda. Pada 1907 ia mulai memperdalam pendidikan kedokteran di Universitas Amsterdam. Dalam waktu satu tahun ia berhasil menyanggah gelar Arts yang berarti memiliki kedudukan yang sama dengan dokter-dokter dari Belanda. Willem berpartisipasi dalam kongres pendidikan kolonial di Den Haag yang menyetujui pendirian universitas di Hindia Belanda, termasuk berdirinya Fakultas Kedokteran sebagai perkembangan dari STOVIA. Willem kemudian memutuskan untuk membuka praktek umum di Batavia. Ia juga aktif dalam perkumpulan Sarekat Ambon dan aktif dalam lembaga beasiswa bagi orang Maluku. Kepakarannya dalam bidang kedokteran mengantarkan Willem menjadi anggota komisi supervisi STOVIA. Pada 1928 ia juga menjadi salah seorang pendiri Perhimpunan Politik Maluku (*Molukus Politiek Verbond*). Willem meninggal dunia pada 1946.

## 3. Jacob Bernadus Sitanala

Dilahirkan dalam keluarga pengusaha kecil pada 18 September 1889 di Kayeli, Pulau Buru. Setelah menamatkan pendidikan dasar pada *Ambonsche Burger School* di Ambon dan pendidikan menengah MULO pada 1904, ia melanjutkan pendidikannya ke STOVIA dan lulus pada 1912. Ia kemudian ditempatkan di jawatan kesehatan. Kemudian ia dikirim ke Merauke untuk mengatasi penyebaran penyakit seks menular. Karena prestasinya yang tinggi dalam tugas pelayanan kedokteran dan penelitian ilmiah, ia mendapat tugas belajar ke Belanda pada 1923 untuk mendalami ilmu penyakit kusta (Lepra). Di Belanda, ia tergabung dalam *Indische Vereniging* (Perhimpunan Indonesia). Kehadirannya di Perhimpunan Indonesia tidak berjalan mulus. Ia dipecat dari organisasi tersebut karena dipandang telah melanggar garis politik organisasi.

Pada 1926 berhasil memperoleh diploma "*Nederlandsche Arts*" dan tahun berikutnya ia mendapatkan gelar doktor dan guru besar dalam ilmu penyakit kusta. Setelah kembali ke Indonesia dan bertugas sebagai ahli penyakit kusta, Sitanala

kemudian diangkat sebagai kepala pemberantasan penyakit kusta di Indonesia. Ia merupakan ahli penyakit kusta yang pertama di Indonesia. Sebagai perintis pemberantasan penyakit kusta, ia dikenal pula di dunia internasional karena karya-karya ilmiah hasil penelitian dan metode baru pengobatan penyakit kusta yang ia kembangkan. Selanjutnya, Sitanala terlibat dalam pendirian Palang Merah Indonesia (PMI). Rumah sakit khusus Lepra pun diberinama sesuai nama dirinya. Namanya selalu dihafal oleh anggota palang merah remaja di Indonesia sebagai satu dari Panitia Lima pendiri PMI.



24. Jacob Bernadus Sitanala



ABDUL MUTHALIB SANGADJI  
(Koleksi Museum Sumpah Pemuda)

## ORGANISASI KEPEMUDAAN DAN KONGRES PEMUDA

### Sejarah Sumpah Pemuda: Pertumbuhan Organisasi Kedaerahan sampai Kongres Pemuda I



25. Pengurus Besar Jong Java  
(Koleksi Museum Sumpah Pemuda)



26. Pengurus Jong Sumatranen Bond (JSB) periode 1926-1928 terlihat Moch. Jamin (ketua) duduk di tengah, di sebelah kanannya Kroeng Raba Nasution  
(Koleksi Museum Sumpah Pemuda)



27. Pendirian Jong Bataks Bond pada 1925  
(Koleksi Museum Sumpah Pemuda)

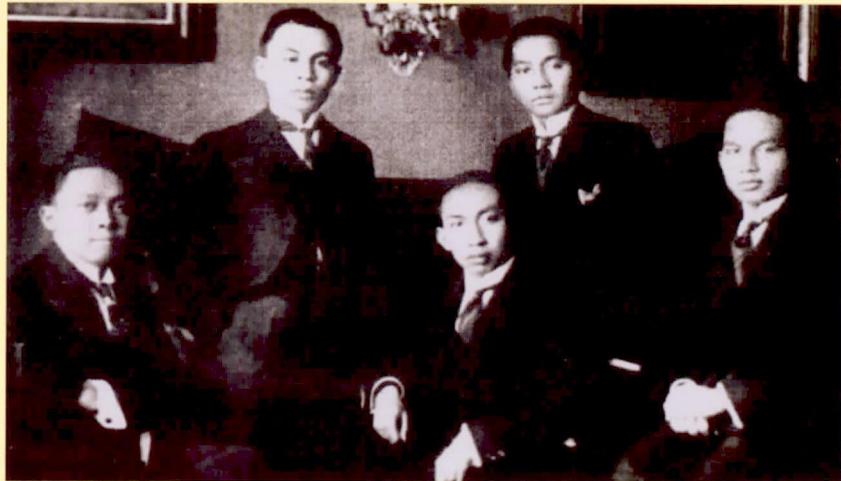
Pada awal abad ke-20 perjuangan bangsa Indonesia menampilkan perjuangan melalui organisasi pergerakan yang menampilkan tokoh-tokoh muda yang mendapat pendidikan Barat. Pendidikan yang mereka tempuh ternyata memberikan gambaran tentang kedudukan negara dan bangsanya di dunia internasional. Gambaran ini yang akhirnya mendorong mereka untuk berusaha mencapai kemerdekaan. Hal tersebut memberikan kesadaran bagi para pemuda untuk membentuk organisasi pemuda seperti Tri Koro Darmo (7 Maret 1915) yang kemudian berubah nama menjadi Jong Java (1918), yang bertujuan mempersatukan pelajar pribumi dan memajukan pengetahuan umum anggotanya.

Pendirian Tri Koro Dharmo mendorong pelajar dari daerah lain mendirikan perkumpulan serupa yang mengusung semangat kedaerahan seperti Jong Sumateranen Bond (1917), Jong Islamieten Bond (1924), Jong Batak, Jong Minahasa, Jong Celebes, Jong Ambon, Sekar Rukun, Pemuda Kaum Betawi, Perhimpunan Indonesia serta kepanduan-kepanduan.

Sementara itu orientasi keindonesiaan sudah memasuki pikiran segenap pemuda Indonesia yang sedang belajar di Belanda, hal ini terlihat dari perubahan nama organisasi pelajar di Belanda dari Indische Vereeniging menjadi Indonesische Vereeniging serta mengeluarkan Manifesto Politik 1925, diantaranya:

1. Rakyat Indonesia sewajarnya diperintah oleh pemerintah yang dipilih sendiri oleh mereka.
2. Dalam memperjuangkan pemerintahan sendiri itu tidak diperlukan bantuan dari pihak manapun.
3. Tanpa persatuan yang kokoh dari berbagai unsur rakyat, tujuan perjuangan itu sulit untuk dicapai.

Manifesto Perhimpunan Indonesia tersebut membawa dampak yang sangat besar ke dalam negeri. Tokoh-tokoh pemuda mulai menyadari pentingnya persatuan di antara perkumpulan kepemudaan. Mereka sepakat untuk menyiapkan pelaksanaan Kongres Pemoeda Pertama pada 30 April–2 Mei 1926 di Gedung Vrijmetselaarsloge, Batavia.



28. Para pendiri Perhimpunan Indonesia berfoto bersama. Dari kiri ke kanan: Darmawan Mangoenkoesoemo, Mohammad Hatta, Iwa Koesoemasoemantri, R. Sastromoeljono dan R.M. Sartono. (Koleksi Museum Sumpah Pemuda)

## Organisasi Kepemudaan dari Timur

### 1. Jong Ambon

Setelah lahir dan berkembangnya Jong Java dan Jong Sumatranen Bond, Pemuda-pemuda yang berasal dari Ambon (Maluku) mendirikan sebuah organisasi atau perkumpulan pemuda yang dinamakan Jong Ambon pada 1918 yang artinya Ambon Muda atau pemuda-pemuda Ambon. Tujuan dari didirikannya Jong Ambon ini adalah untuk membina persatuan dan mempererat tali persaudaraan di kalangan pemuda-pemuda yang berasal dari daerah Ambon. Jong Ambon bergerak terutama di bidang sosial budaya, khususnya di bidang olah raga, seni musik dan seni suara. Tokoh Jong Ambon yang terkenal antara lain adalah J. Leimena.

### 2. Jong Minahasa

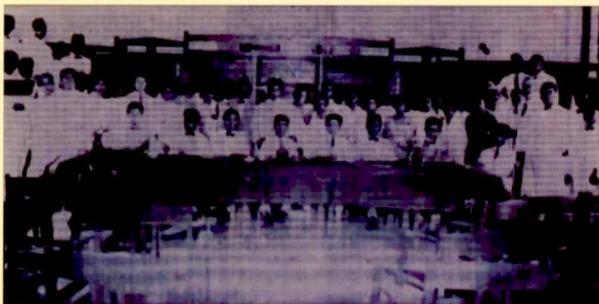
Pada 1918 pemuda-pemuda yang berasal dari Minahasa, Sulawesi Utara, mendirikan perkumpulan atau organisasi pemuda yang terkenal dengan nama Jong Minahasa atau Pemuda Minahasa. Tujuan didirikan organisasi ini adalah menggalang dan mempererat persatuan dan tali persaudaraan di kalangan para pemuda pelajar yang berasal dari Minahasa. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Jong Minahasa

bergerak di bidang kesenian, olahraga dan sosial budaya. Tokoh Jong Minahasa salah satunya adalah G.R Pantouw.

### 3. Jong Celebes

Jong Celebes adalah organisasi pemuda yang menghimpun para pemuda pelajar yang berasal dari Celebes atau Pulau Sulawesi yang didirikan pada 1918. Jong Celebes berusaha menghimpun pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi dari seluruh pulau Sulawesi seperti pemuda-pemuda suku Minahasa, suku Sangir, suku Bolang Mongondow, suku Gorontalo, bahkan juga dari Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan. Maksud dan tujuannya ialah mempererat rasa persatuan dari tali persaudaraan di kalangan pemuda pelajar yang berasal dari Pulau Sulawesi. Tokoh-tokoh Jong Celebes misalnya Arnold Monotutu, Waworuntu dan Magdalena Mokoginta.

## KONGRES PEMUDA I



29. Panitia Kongres Pemuda Pertama, berfoto bersama di dalam gedung St.Zan (Koleksi Museum Sumpah Pemuda )



30. Peserta Kongres Pemuda Pertama setelah mengadakan kongres di gedung St.Zan (Sekarang gedung Farmasi), berdiri di barisan depan dengan pakaian berbeda adalah Emma Poeradiredja (Koleksi Museum Sumpah Pemuda )

Kongres Pemuda Pertama dilaksanakan pada 30 April – 2 Mei 1926, Kongres ini dihadiri oleh wakil organisasi pemuda Jong Java, Jong Sumateranen Bond, Jong Ambon, Sekar Rukun, Jong Islamieten Bond, Studerenden Minahasaers dan Jong Batak Bond. Kongres ini dilaksanakan oleh sebuah panitia yang terdiri dari Mohammad Tabrani (Ketua), Soemarto (Wakil Ketua), Djamaluddin Adinegoro (Sekertaris), Soewarso (bendahara), serta dilengkapi oleh beberapa anggota seperti Bahder Johan (Jong Sumateranen Bond), Jan Toule Soulehwi (Jong Ambon), Paul Pinantoan (Jong Celebes), Achmad Hamami (Sekar Rukun), Sanoesi Pane (Jong Bataks Bond) dan Sarbaini (Jong Sumateranen Bond).

Tujuan Kongres Pemuda I adalah mencapai jalan membina perkumpulan pemuda yang tunggal dan membuat badan sentral dengan maksud memajukan paham persatuan kebangsaan serta mempererat hubungan antara semua perkumpulan pemuda. Pembahasan dalam Kongres Pemuda I dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Mohammad Tabrani, Soemarto dan Muhammad Yamin membahas dan mematangkan cita-cita satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa menuju Indonesia Merdeka

2. Bahder Johan, Djaksodipoero dan Sitien Adam membahas tentang kedudukan wanita dalam masyarakat Indonesia.
3. Terdiri dari Paul Pinontoan yang membahas tentang peran agama dalam pergerakan persatuan nasional

Adapun titik berat Kongres Pemuda I ini adalah penyebaran jiwa nasional Indonesia di kalangan Pemuda Indonesia serta hasil utama dari Kongres Pemuda I ini adalah mengakui dan menerima cita-cita persatuan Indonesia.

## ORGANISASI PEMUDA YANG MUNCUL SETELAH KONGRES PEMUDA I

### 1. Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI)

Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia didirikan pada September 1926 yang beranggotakan pelajar-pelajar Rechts Hogeschool, Geneskundige Hogeschool dan Technische Hogeschool. Tujuan didirikannya PPPI adalah Indonesia merdeka dan anggotanya harus dididik untuk menjadi pemimpin-pemimpin rakyat yang insaf atas kewajibannya sebagai anak-anak Indonesia yang bertugas menyiapkan bangsa Indonesia untuk menerima Indonesia Raya. PPPI menjadikan Gedung Kramat 106 sebagai kantor perkumpulan dan kantor redaksi majalah Indonesia Raja. Adapun tokoh PPPI antara lain: Soegondo, Suwiryo, S. Reksodiputro, Muhammad Yamin, A.K. Gani, Tamzil, Soenarko, Sumanang dan Amir Syarifudin.



**31. Dewan Pengurus PPPI periode 1939-1941. Tampak Chaerul Saleh nomor tiga dari kanan dan Supeno dari kiri. Berfoto di depan Gedung Perjuangan Rakyat Jl. Kramat Raya 174 Jakarta (Koleksi Museum Sumpah Pemuda)**

### 2. Jong Indonesia /Pemuda Indonesia

Jong Indonesia didirikan pada 20 Februari 1927 di Bandung atas dasar gagasan para tokoh seperti Joesoepadi, Soegiono, Mr. Soenaryo dan Mr. Sartono yang berpendapat bahwa perlu adanya koreksi terhadap gerakan pemuda yang sifatnya kedaerahan dan sudah tiba saatnya membentuk organisasi yang berasaskan kebangsaan serta netral terhadap agama. Anggota Jong Indonesia terdiri dari murid AMS (*Algemeene Middlebare School*), THS (*Technische Hoogeschool*), RHS (*Recht Hoogeschool*) dan STOVIA (*School Tot Opleidieng van Inlandsche Artsen*). Memiliki delapan cabang di kota besar, yaitu: Bandung, Jakarta, Bogor, Surabaya, Yogyakarta, Solo, Purwakarta dan Medan. Tujuan Jong Indonesia adalah memperluas dan memperkuat ide persatuan nasional Indonesia di kalangan Bangsa Indonesia.

## KONGRES PEMUDA II

### **POEToesan CONGRES PEMOEDA-PEMOEDA INDONESIA.**

Kerapatan pemoeda-pemoeda Indonesia jang diadakan oleh perkoempoelan-perkoempoelan pemoeda Indonesia jang berdasarkan kebangsaan, dengan namanja: Jong-Java, Jong-Sumatra (Pemoeda Soematera), Pemoeda-Indonesia, Sekar Roekoen, Jong-Islamieter Bond, Jong-Bataksbond, Jong-Selébés, Pemoeda Kaoem Betawi dan Perhimpunan peladjar-peladjar Indonesia;

memboeka rapat pada tanggal 27 dan 28 October tahoen 1928 dinegeri Djakarta; sesoedahnja mendengar pidato-pidato dan pembitjaraan jang diadakan dalam kerapatan tadi;

sesoedahnja menimbang segala isi-isi pidato-pidato dan pembitjaraan ini;

kerapatan laloe mengambil poetoesan:

#### **PERTAMA.**

**KAMI POETERA DAN POETERI INDONESIA MENGAKOE BERTOEMPAH-DARAH JANG SATOE, TANAH INDONESIA.**

#### **KEDOEAE.**

**KAMI POETERA DAN POETERI INDONESIA MENGAKOE BERBANGSA JANG SATOE, BANGSA INDONESIA.**

#### **KETIGA.**

**KAMI POETERA DAN POETERI INDONESIA MENDJOENDJOENG BAHASA PERSATOEAN, BAHASA INDONESIA.**

Setelah mendengar poetoesan ini, kerapatan mengeloearkan kejakinan azas ini wadajib dipakai oleh segala perkoempoelan-perkoempoelan kebangsaan Indonesia;

mengeloearkan kejakinan persatoean Indonesia diperkoeat dengan memperhatikan dasar persatoeannja:

kemaoean

sedjarah

bahasa

hoekoem-'adat

pendidikan dan kepandoean

dan mengeloearkan pengharapan, soepaja poetoesan ini disiarkan dalam segala soerat kabar dan dibatjakan dimoeka rapat perkoempoelan-perkoempoelan kita.

IPPI ALI MOESA CONTRY LANGSA

32. Putusan Kongres Pemuda Kedua dimuat dalam surat kabar Persatoean Indonesia 15 Nopember 1928. (Koleksi Museum Sumpah Pemuda)

Dibentuknya PPPI pada 1926 yang menjadikan gedung Kramat Raya 106 sebagai tempat perkumpulan dan diskusi. Gedung ini didirikan oleh Sie Kong Liong pada 1900-an untuk tempat pondokan pelajar. Pada 1928 gedung ini diberi nama gedung Indonesisch Clubgebouw (IC) yang dimanfaatkan sebagai tempat tinggal dan tempat diskusi. Peserta diskusi di gedung IC menilai perlu mengadakan kegiatan untuk menyamakan arah perjuangan organisasi kepemudaan. Peserta diskusi memutuskan untuk mengadakan Kongres Pemuda II pada 27-28 Oktober 1928 yang diharapkan bisa menghasilkan keputusan yang lebih maju.

Kongres Pemuda II dilaksanakan di tiga tempat yang berbeda di Jakarta, kongres ini dihadiri oleh perwakilan PPPI, Jong Java, Jong Sumateranen Bond, Jong Bataks Bond, Jong Islamieter Bond, Pemoeda Indonesia, Jong Celebes, Sekar Rukun, Jong Ambon dan Pemuda Kaum Betawi. Pelaksanaannya dilaksanakan oleh panitia yang terdiri dari Soegondo Djojopoespito (Ketua), R.M. Djoko Marsaid (Wakil Ketua), Muhammad Yamin (sekertaris), Amir Sjarifuddin (Bendahara). Panitia ini dilengkapi dengan lima orang anggota yang terdiri dari Djohan Mohamad Tjaja, R. Katjasoengkana, R.C.L. Senduk, Johannes Leimena dan Rochjani Soe'od.

Kongres Pemuda II ini dilakukan dalam tiga gedung yang letaknya berlainan dan dibagi dalam tiga kali rapat. Rapat Pertama dilaksanakan pada Sabtu malam 27 Oktober 1928 pukul 07.30-11.30 di Gedung Katholieke Jongenlingen Bond (Jalan Lapangan Banteng). Rapat dibuka oleh ketua Soegondo Djojopoespito, Dalam sambutannya Soegondo Djojopoespito berharap kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan di kalangan pemuda. Acara dilanjutkan dengan mencermati dan

mendiskusikan uraian Moehammad Jamin tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Menurutnya ada lima faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan dan kemauan.

Rapat Kedua dilaksanakan pada Minggu 28 Oktober 1928 pukul 8.00-12.00 bertempat di Gedung Oost Java Bioscoop di Koningsplein Noord (sekarang Jalan Merdeka Utara 14). Dalam rapat kedua ini membahas masalah pendidikan dimana kedua pembicara, Poernomowoelan dan Sarmidi Mangoensarkoro sependapat bahwa anak harus mendapat pendidikan kebangsaan, harus pula ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Anak juga harus dididik secara demokratis.

Rapat ketiga dilaksanakan pada Senin malam 28 Oktober 1928 pukul 17.30-23.30 di Gedung Indonesisch Clubhuis Kramat 106 (Sekarang menjadi Jl. Kramat Raya). Dalam rapat ketiga ini Soenario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Sedangkan Ramelan mengemukakan, gerakan kepanduan tidak dapat dipisahkan dari pergerakan nasional. Gerakan kepanduan mendidik anak-anak disiplin dan mandiri, suatu hal yang dibutuhkan dalam perjuangan.

Keputusan Rapat pada kongres kedua ini menghasilkan ikrar kesepakatan pemuda Indonesia, yaitu :

*Pertama:*

*Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, Tanah Indonesia*

*Kedua:*

*Kami putra dan putri Indonesia Mengaku berbangsa yang satu Bangsa Indonesia*

*Ketiga:*

*Kami Putra dan Putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan Bahasa Indonesia.*

## PEMBENTUKAN INDONESIA MUDA

Setelah dilaksanakannya Kongres Pemuda Kedua, adanya keinginan untuk segera didirikannya perkumpulan yang sejalan dengan kemauan persatuan Indonesia yang berdasarkan kemerdekaan kebangsaan Indonesia. Atas dasar keinginan tersebut dibentuklah Komisi Besar Indonesia Muda (KBIM) 23 April 1926. KBIM melaksanakan Kongres di Surakarta (Solo) pada 28 Desember – 2 Januari 1931 untuk mendirikan Badan Fusi yang diberi nama Indonesia Muda. Maka diputuskan nama-nama perkumpulan Jong Indonesia, Pemuda Sumatera, Pemuda Indonesia, Jong Selebés dan Sekar Rukun dihapuskan.



**33. Komisi Besar Indonesia Muda. Duduk dari kiri ke kanan: Mr. R.T Wongsonegoro. M. Yamin, R.K. Poerbopranoto (ketua), R.M. Yusupadi Danuhadiningrat. Berdiri di belakang dari kiri ke kanan: A.K. Gani, Asaat, Kroeng Raba Nasution, Raden Sudiman dan M. Tamzi**

Hasil putusan kongres adalah didirikannya Indonesia Muda pada 31 Desember 1931. Tujuan dari Indonesia Muda adalah memperkuat rasa persatuan di kalangan pelajar-pelajar, membangunkan dan mempertahankan keinsyafan, bahwa mereka adalah anak bangsa yang bertanah air satu agar tercapailah Indonesia Raya.

### **Wage Rudolf Supratman : Maestro Biola dan Pencipta Lagu Indonesia Raya**



**34. Wage Rudolf Supratman  
(Koleksi Museum Sumpah Pemuda)**

Wage Rudolf Supratman lahir pada 9 Maret 1903 di Desa Trembelang Kecamatan Somongari dan terlahir dengan nama asli Wage Supratman. Memulai pendidikannya di ELS yang merupakan sekolah untuk orang pribumi yang setara dengan orang Belanda. Dari sinilah nama "Rudolf" diberikan pada Wage agar bisa bersekolah di ELS tersebut. Soepratman lalu belajar bahasa Belanda di sekolah malam selama 3 tahun, kemudian melanjutkannya ke Normaalschool. Ketika berumur 20 tahun, lalu dijadikan guru di Sekolah Angka 2. Dua tahun selanjutnya ia mendapat ijazah Klein Ambtenaar.

Fase pengenalan Supratman dengan musik berbarengan dengan dimulainya lembaran baru hidupnya di Makassar bersama keluarga van Eldik, suami kakaknya yang mahir bermain biola juga menjadi inspirasi sekaligus guru musik Supratman. Bersama suami kakak sulungnya itu pula, Supratman sempat tergabung dalam sebuah band jazz bernama Black and White Jazz Band. Bersama grup ini Supratman menjadi paham rasanya tampil di hadapan umum semenjak ia mulai belajar bermain musik. Penampilan perdana Supratman sebagai pemain biola sendiri dimulai saat kelompok ini menyelenggarakan gelaran malam musik jazz di dalam kompleks Kees.

Setelah memberhentikan karier Supratman sebagai guru pada 1923, kakak iparnya, WM van Eldik berhasil membantu Supratman mendapatkan pekerjaan di kantor pengacara Mr. Sculten. Pekerjaannya di tempat ini pula yang memulai persentuhannya dengan tokoh-tokoh pergerakan. Dari situ kesadaran politik Supratman terus tumbuh sehingga pada akhirnya ia memutuskan kembali ke Jawa.

Perjalanan baru Supratman dimulai di Surabaya pada 1924 di mana ia tinggal bersama keluarga kakaknya yang kedua, Rukina Supratinah. Kemudian ia kembali pindah ke rumah ayahnya di Cimahi sebelum akhirnya tinggal di Bandung dan bekerja sebagai wartawan untuk *Kaum Muda*. Pekerjaan baru di tempat anyar ini cukup mengagetkan bagi Supratman karena upah yang ia dapat cukup rendah. Untuk menggandakan penghasilan, Supratman menambah pekerjaan dengan menjadi pemain biola untuk kelompok musik tetap di gedung Societet Bandung.



35. Biola buatan Nicolaus Amateus Fecit milik W.R. Supratman (Koleksi Museum Sumpah Pemuda)

Bersamaan dengan tumbuhnya semangat pesatuan, muncul pula gagasan untuk mempunyai lagu kebangsaan sendiri di kalangan bangsa Indonesia. Di Koran "Persatoean Indonesia" No. 6, Tuan S.P. menulis bahwa nyanyi (lagu - pen) kebangsaan tidak mendapat perhatian dari putera-puteri Indonesia, padahal artinya sangat besar sekali. Panggilan dalam "Persatoean Indonesia" mendorong Soepratman menciptakan lagu "Indonesia". Pada "Persatoean Indonesia" Nomor 8, naskah lagu tersebut sudah dimuat dengan judul "Indonesia Raya" dan pada "Persatoean Indonesia" Nomor 9, lagu Indonesia Raya sudah disebut sebagai 'lagu kebangsaan'. Dalam Kongres Pemuda Kedua, 28 Oktober 1928, di gedung Club Indonesia Jalan Kramat nomor 106, atas permintaan para hadirin, Soepratman, menyanyikan lagu Indonesia Raya.

**INDONESIA**  
Jangan Terlalu Cepat  
(Adante)

I  
Indonesia, tanah airku,  
Tanah tumpah darahku;  
Disanalah aku berdiri,  
Menjaga pandu ibuku,

Indonesia, kebangsaanku,  
Kebangsaan tanah airku;  
Marilah kita berseru,  
"Indonesia bersatu",

Hiduplah tanahku,  
Hiduplah neg'riku,  
Bangsaku, jiwaku, semua;  
Bangunlah rayatnya,  
Bangunlah badannya,  
Untuk Indonesia Raya.

Indones', Indones',  
Mulia, mulia,  
Tanahku, neg'riku, yang terkucinta  
Indones', Indones'  
Mulia, Mulia,  
Hiduplah Indonesia Raya

II  
Indonesia, tanah yang mulia,  
Tanah kita yang kaya;  
Di sanalah aku hidup,  
Untuk s'lama lamanya,

Indonesia, tanah pusaka,  
Pusaka kita semuanya;  
Marilah kita berseru:  
"Indonesia Bersatu",

Suburlah tanahnya,  
Suburlah jiwanya,  
Bangsanya, rayatnya, semua;  
Sedarlah hatinya,  
Sedarlah budinya,  
Untuk Indonesia Raya.

Indones', Indones',  
Mulia, mulia,  
Tanahku, neg'riku yang kucinta  
Indones', Indones'  
Mulia, mulia,  
Hiduplah Indonesia Raya

III  
Indonesia, tanah yang suci,  
Bagi kita di sini,  
Di sanalah kita berdiri,  
Menjaga Ibu Sejati.

Indonesia, tanah berseri,  
Tanah yang terkucintai;  
Marilah kita bernyanyi  
'Indonesia Bersatu'

S'lamatlah rayatnya  
S'lamatlah anaknya,  
Lautnya pulaunya, semua;  
Majulah neg'rinya  
Majulah Pandunya,  
Untuk Indonesia Raya

Indones', Indones',  
Mulia, mulia,  
Tanahku, neg'riku yang kucinta  
Indones', Indones',  
Mulia, mulia,  
Hiduplah Indonesia Raya

Sumber: Persatuan Indonesia, No. 8

Syair yang dinyanyikan pada 28 Oktober 1928  
Di Indonesische Clubgebouw, Jl Kramat Raya No  
106

**INDONESIA**  
Jangan Terlalu Cepat  
(Adante)

I  
Indonesia, tanah airku,  
Tanah tumpah darahku;  
Disanalah aku berdiri,  
Menjaga pandu ibuku,

Indonesia, kebangsaanku,  
Kebangsaan tanah airku;  
Marilah kita berseru,  
"Indonesia bersatu",

Hiduplah tanahku,  
Hiduplah neg'riku,  
Bangsaku, jiwaku, semua;  
Bangunlah rayatnya,  
Bangunlah badannya,  
Untuk Indonesia Raya.

Indones', Indones',  
Mulia, mulia,  
Tanahku, neg'riku, yang terkucinta  
Indones', Indones'  
Mulia, Mulia,  
Hiduplah Indonesia Raya

II  
Indonesia, tanah yang mulia,  
Tanah kita yang kaya;  
Di sanalah aku hidup,  
Untuk s'lama lamanya,

Indonesia, tanah pusaka,  
Pusaka kita semua;  
Marilah kita berseru:  
"Indonesia Bersatu",

Suburlah tanahnya,  
Suburlah jiwanya,  
Bangsanya, rayatnya, semua;  
Sedarlah hatinya,  
Sedarlah budinya,  
Untuk Indonesia Raya.

Indones', Indones',  
Mulia, mulia,  
Tanahku, neg'riku yang kucinta  
Indones', Indones'  
Mulia, mulia,  
Hiduplah Indonesia Raya

III  
Indonesia, tanah yang suci,  
Bagi kita di sini,  
Di sanalah kita berdiri,  
Menjaga Ibu Sejati.

Indonesia, tanah berseri,  
Tanah yang terkucintai;  
Marilah kita bernyanyi  
'Indonesia Bersatu'

S'lamatlah rayatnya  
S'lamatlah putranya,  
Pulaunya lautnya, semua;  
Majulah neg'rinya  
Majulah Pandunya,  
Untuk Indonesia Raya

Indones', Indones',  
Mulia, mulia,  
Tanahku, neg'riku yang kucinta  
Indones', Indones',  
Mulia, mulia,  
Hiduplah Indonesia Raya

Sumber: Indonesia Raja, Lagu Kebangsaan Indone-  
sia

Terbitan W.R. Soepratman Publicist, Weltevreden

Syair yang diterbitkan oleh W.R. Soepratman, No-  
vember 1928

**INDONESIA RAYA**  
Dimarcia

I  
Indonesia, tanah airku,  
Tanah tumpah darahku;  
Disanalah aku berdiri,  
Jadi pandu ibuku,

Indonesia, kebangsaanku,  
Bangsa dan tanah airku;  
Marilah kita berseru,  
"Indonesia bersatu",

Hiduplah tanahku,  
Hiduplah neg'riku,  
Bangsaku, rakyatku, semuanya;  
Bangunlah jiwanya,  
Bangunlah badannya,  
Untuk Indonesia Raya.

Indonesia Raya,  
Merdeka, merdeka,  
Tanahku, neg'riku yang kucinta  
Indonesia Raya  
Merdeka, merdeka  
Hiduplah Indonesia Raya

II  
Indonesia, tanah yang mulia,  
Tanah kita yang kaya;  
Di sanalah aku berada,  
Untuk s'lama lamanya,

Indonesia, tanah pusaka,  
Pusaka kita semua;  
Marilah kita mendoa:  
"Indonesia Bahagia",

Suburlah tanahnya,  
Suburlah jiwanya,  
Bangsanya, rakyatnya, semuanya;  
Sadarlah hatinya,  
Sadarlah budinya,  
Untuk Indonesia Raya.

Indonesia Raya,  
Merdeka, merdeka,  
Tanahku, neg'riku yang kucinta  
Indonesia Raya,  
Merdeka, merdeka,  
Hiduplah Indonesia Raya

III  
Indonesia, tanah yang suci,  
Tanah kita yang sakti;  
Di sanalah aku berdiri,  
Menjaga Ibu Sejati.

Indonesia, tanah berseri,  
Tanah yang aku sayangi;  
Marilah kita berjanji  
"Indonesia Abadi"

S'lamatlah rakyatnya  
S'lamatlah anaknya,  
Pulaunya lautnya, semuanya;  
Majulah neg'rinya  
Majulah Pandunya,  
Untuk Indonesia Raya

Indonesia Raya,  
Merdeka, merdeka,  
Tanahku, neg'riku yang kucinta  
Indonesia Raya,  
Merdeka, merdeka,  
Hiduplah Indonesia Raya

Sumber: Buku Lagu Wajib Nasional

Syair yang berlaku sejak jaman pendudukan  
Jepang, hingga sekarang.  
Pada kegiatan resmi hanya stanza I yang din-  
yanyikan

## Tokoh-tokoh Jong Ambon dalam Kongres Pemuda II

Dr. Johannes Leimena

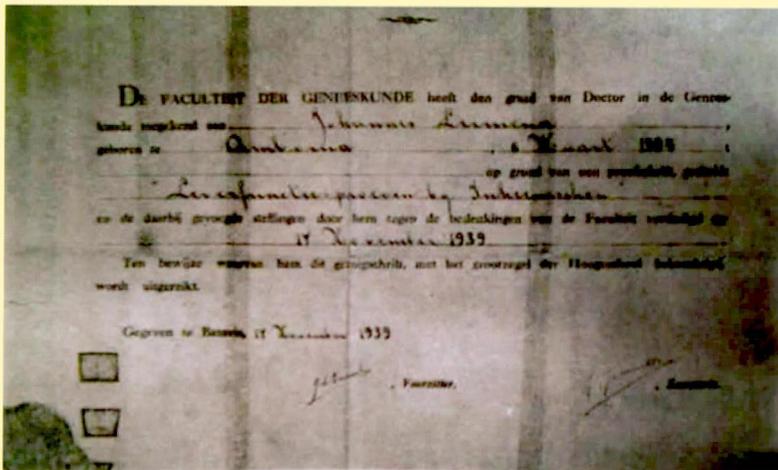


36. Johannes Leimena salah seorang tokoh Jong Ambon, Anggota PPPI dan panitia Kongres Pemuda II (Koleksi Museum Sumpah Pemuda)

Johanes Leimena lahir di Ambon 6 Maret 1905, memulai pendidikan formal di Ambonsche Burgerschool. Kemudian pada 1914, Leimena hijrah ke Batavia dimana ia meneruskan studinya di ELS (*Europeesch Lagere School*), lalu pindah ke sekolah menengah Paul Krugerschool (kini PSKD Kwitang). Dari sini beliau melanjutkan pendidikannya ke MULO Kristen dan menyelesaikannya pada 1922, kemudian melanjutkan pendidikan kedokteran STOVIA (*School Tot Opleiding Van Indische Artsen*) dan menyelesaikannya hingga 1930. Setelah menempuh pendidikan kedokterannya di Stovia ia melanjutkan pendidikan di Geneeskunde Hogeschool (GHS - Sekolah Tinggi Kedokteran) di Jakarta yang diselesaikannya pada 1939.

Johanes Leimena merupakan anggota dari organisasi kepemudaan Jong Ambon. Selama belajar di Stovia, ia bergabung dalam VAS (*Vereniging Ambonshe Student*) Jong Ambon dan giat melaksanakan diskusi mengenai pendidikan, sosial politik dan kebudayaan. Perhatian J. Leimena pada pergerakan nasional berkembang sejak ia bergabung dalam organisasi ini. Keaktifannya dalam VAS Jong Ambon mendorong J. Leimena turut hadir dalam Kongres Pemuda Pertama pada 1926. Ia juga menjadi anggota panitia Kongres Pemuda Kedua 1928 selaku perwakilan dari VAS Jong Ambon.

Selama belajar di Stovia J.Leimena tidak hanya memfokuskan diri dalam ilmu kedokteran. Ia juga menambah pengetahuannya dengan menjadi anggota perpustakaan umum, menjadi anggota CSV (*Christen Studenten Vereniging*), selain itu karena ia merupakan seorang yang taat beragama serta mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang kekristenan, ia tertarik pada pergerakan "Oiukemene". Keprihatinan Leimena atas kurangnya kepedulian sosial umat Kristen terhadap nasib bangsa, merupakan hal utama yang mendorong niatnya untuk aktif pada gerakan ini. Pada 1926, Leimena ditugaskan untuk mempersiapkan Konferensi Pemuda Kristen di Bandung. Konferensi ini adalah perwujudan pertama Organisasi *Oikumene* di kalangan pemuda Kristen.



Agam pemberian gelar Doctor in de Geneeskunde oleh G.H.S. Jakarta tgl. 17 Nopember

**37. Piagam doktor in de Geneeskunde Johannes Leimena oleh G.H.S Jakarta 17 Nopember 1939 (Koleksi Museum Sumpah Pemuda)**



**38. Konferensi Federasi Mahasiswa Kristen sedunia di Citeureup Bogor 6 – 14 September 1933. Dr. J.Leimena duduk di kursi no 2 sebelah kiri (berdiri no 3), di belakang agak ke kiri Dr.J. Leimena, berdiri ibu leimena (Koleksi Museum Sumpah Pemuda)**

Kiprahnya sebagai dokter dimulai sejak 1930, Pertama kali diangkat sebagai dokter pemerintah di "CBZ Batavia" (kini RS Cipto Mangunkusumo). Tak lama ia dipindahtugaskan di Karesidenan Kedu saat Gunung Merapi meletus. Setelah itu dipindahkan ke Rumah Sakit Zending Immanuel Bandung. Di rumah sakit ini ia bertugas dari 1931 sampai 1941. Selain itu, J. Leimena merupakan tokoh politik yang paling sering menjabat sebagai menteri kabinet Indonesia dan satu-satunya menteri Indonesia yang menjabat sebagai menteri selama 21 tahun berturut-turut tanpa

terputus. Leimena masuk ke dalam 18 kabinet yang berbeda, sejak Kabinet Sjahrir II (1946) sampai Kabinet Dwikora II (1966), baik sebagai Menteri Kesehatan, Wakil Perdana Menteri, Wakil Menteri Pertama maupun Menteri Sosial. Selain itu Leimena juga menyandang pangkat Laksamana Madya (Tituler) di TNI-AL ketika ia menjadi anggota dari KOTI (Komando Operasi Tertinggi) dalam rangka Trikora.

Pada 1945, Partai Kristen Indonesia (Parkindo) terbentuk dan pada 1950, ia terpilih sebagai ketua umum dan memegang jabatan ini hingga 1957. Selain di Parkindo, Leimena juga berperan dalam pembentukan DGI (Dewan Gereja-gereja di Indonesia, kini PGI), juga pada 1950. Di lembaga ini Leimena terpilih sebagai wakil ketua yang membidangi komisi gereja dan negara.

Ketika Orde Baru berkuasa, Leimena mengundurkan diri dari tugasnya sebagai menteri, namun ia masih dipercaya Presiden Soeharto sebagai anggota DPA (Dewan Pertimbangan Agung) hingga 1973. Usai aktif di DPA, ia kembali melibatkan diri di lembaga-lembaga Kristen yang pernah ikut dibesarkannya seperti Parkindo, DGI, UKI, STT dan lain-lain. Ketika Parkindo berfusi dalam PDI (Partai Demokrasi Indonesia, kini PDI-P), Leimena diangkat menjadi anggota DEPERPU (Dewan Pertimbangan Pusat) PDI dan pernah pula menjabat Direktur Rumah Sakit DGI Cikini. Pada 29 Maret 1977, Johannes Leimena meninggal dunia di Jakarta. Dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata.

### **Abdul Muthalib Sangadji**

A.M Sangadji lahir di Rohomoni, Pulau Haruku, Maluku dan meninggal di Yogyakarta, Indonesia, 1947. **A.M. Sangadji** adalah pahlawan perintis kemerdekaan Indonesia, berasal dari keluarga *Sangaji Hatuhaha*. Sangaji sendiri merupakan gelar untuk wakil Kesultanan Ternate pada masanya di Pulau Haruku (*Nusa Hatuhaha*). A.M Sangadji memulai pendidikan dasar pada Sekolah Belanda HIS dan dilanjutkan dengan pendidikan menengah MULO. A.M. Sangadji yang tidak sempat melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi kemudian memilih terjun dalam dunia politik.

Bersama H.O.S. Cokroaminoto dan beberapa pejuang sezamannya seperti H. Agus Salim turut andil dalam mendirikan organisasi Sarekat Islam yang sebelumnya dikenal Serikat Dagang Islam pada 1912. A.M. Sangadji juga pernah berpartisipasi sebagai peserta dalam Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928 di Jakarta. Dikenal piawai dalam berpidato A.M. Sangadji memiliki mobilitas tidak hanya di Maluku tempat asalnya, tapi juga pernah berkiprah di Borneo, terlebih lagi di Jawa. Pada tahun 1920-an, di Samarinda Kalimantan Timur, A.M. Sangaji mendirikan Balai Pengadjaran dan Pendidikan Rakjat (BPPR) serta mengelola Neutrale School untuk menampung anak-anak sekolah dari kalangan bumiputera.

Setelah mendengar berita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, A.M. Sangadji melakukan perjalanan dari Samarinda ke Banjarmasin untuk bertemu dengan pemimpin BPRI, menyebarkan berita kemerdekaan bangsa Indonesia di daerah yang dilalui, dan mengibarkan bendera Merah Putih. Oleh para pejuang kemerdekaan sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, A.M. Sangadji disebut sebagai pemimpin tua dan dijuluki **Jago Tua**, seperti diwartakan dalam beberapa surat kabar di ibukota Republik, Hindenburg Kalimantan, serta Merdeka Solo. Pihak Kolonial Belanda dan Jepang pun tahu tentang kedudukan dia sebagai pemimpin tua itu. Pada April 1946 polisi Belanda berhasil menangkap A.M. Sangadji

dan memenjarakannya di penjara Banjarmasin. Setelah keluar penjara Banjarmasin, A.M. Sangadji menyeberang ke pulau Jawa. Ia kemudian memimpin Laskar Hizbullah yang berpusat di Yogyakarta dan pernah menugaskan R. Soedirman untuk membentuk Laskar untuk daerah Martapura dan Pelaihari serta Tamtomo sebagai penghubung Markas Besar Hizbullah Yogya untuk Kalimantan. Akan tetapi, ia kemudian tewas ditembak militer ketika Agresi Militer Belanda I di Yogyakarta 1947.

A. M Sangadji dan Agus Salim mengundurkan diri dan mendirikan Penyardar sebagai suatu partai baru. Partai baru ini diperkuat tokoh-tokoh muda seperti Sarjan dan Mohammad Roem. A.M Sangadji kemudian pindah ke Makassar dan Samarinda. Di kedua tempat ini ia terus mengobarkan semangat perjuangan dan pidato-pidatonya dinilai pemerintah Belanda sangat berbahaya. Ia ditangkap dan dipenjarakan. Kemudian dilepaskan dari penjara dan ikut lagi dalam perjuangan pada revolusi fisik. Bersama tokoh-tokoh pejuang lainnya, A.M Sangadji pindah ke Yogyakarta dan berjuang di sana. Di ibukota perjuangan ini, ia meninggal sebagai seorang pejuang dan pemerintah RI menghargai jasa-jasanya sebagai salah seorang peserta Kongres Pemuda ke-2 dan juga sebagai seorang perintis kemerdekaan Indonesia.



40. Sekolah yang didirikan oleh A.M.Sangaji di Kalimantan Barat



SKETSA REVOLUSI I  
(Dok. Museum Basoeki Abdullah)

# PROKLAMASI KEMERDEKAAN

## Strategi Infiltrasi Kawasan

Keunikan Jepang dalam melaksanakan operasi intelejen, memang berbeda dengan kebanyakan dengan negara-negara lain pada masa awal abad-20. Pergerakan intelejen Jepang ke Asia Tenggara sudah dirancang sedemikian rupa jauh-jauh hari. Sebelum datang ke Indonesia pada 1942 Jepang telah mempelajari geopolitik wilayah Asia Pasifik sejak awal abad-20.



**41.** Kapal Perang Amerika Serikat mengeluarkan kepulan asap saat terjadi serangan terhadap pangkalan militer Pearl Harbor pada 8 Desember 1941

Strategi perdagangan merupakan prioritas Jepang untuk memata-matai wilayah Asia Tenggara, sehingga Jepang mampu menancapkan kukunya di wilayah Asia Tenggara melalui pemasaran produk-produk Jepang dengan harga murah. Inilah imperialisme Jepang beserta praktek-praktek intelejennya yang berupaya untuk menguasai wilayah Asia Pasifik, Asia Tenggara dan terutama Indonesia.

Gugusan kepulauan di wilayah Samudera Pasifik kendati terdiri dari negara-negara kecil namun memiliki posisi strategis di peta dunia. Kesemua negara tersebut ternyata sangat bergantung kepada satu negara besar, yaitu Amerika Serikat. Maka Jepang telah berhitung untung ruginya, demi era industrialisasi di negara Jepang, maka satu-satunya cara untuk menguasai Asia Tenggara yang kaya sumber daya alam adalah menguasai wilayah Kepulauan Pasifik. Jepang melihat posisi strategis Indonesia sebagai benteng dan kandungan sumber daya alam serta sumber daya manusia yang besar dan melimpah yang akan menguntungkan Jepang dalam perang Asia Timur Raya.

Di dalam buku karangan G.S.S.J. Sam Ratulangi, Muhamad Husni Thamrin dan Soetardjo Kartohadikoesoemo yang berjudul *De Pacific: Verzameling* tahun 1938 diungkap bagaimana pentingnya wilayah Pasifik saat itu termasuk potensi yang dikandungnya termasuk permasalahan geopolitik kawasan tersebut

## Serangan Itu Dimulai: Kedatangan Jepang



**42. Konvoi Tentara Jepang di Kalimantan Desember 1941**



**43. Suasana pertemuan saat kapitulasi Belanda kepada Jepang di Kalijati Subang 8-9 Maret 1942**

Pada 8 Desember 1941 Jepang mulai mewujudkan keinginannya untuk mendirikan Persemakmuran Asia Timur Raya dengan menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbour, Kepulauan Hawaii. Serangan tersebut menjadi momentum awal takluknya wilayah Asia Pasifik ke tangan Jepang. Tanpa kesulitan, dalam tempo singkat wilayah-wilayah yang diduduki oleh kolonialis Eropa diekspansi oleh militer Jepang. Setelah Filipina, Kuching (Malaysia) berhasil dikuasai, maka wilayah jajahan Belanda yang menjadi target selanjutnya.

Serangan dari Utara Kepulauan Indonesia diarahkan ke wilayah Kalimantan yang kaya kandungan mineral, Sulawesi dan Maluku Utara yang merupakan pintu gerbang pertahanan wilayah Pasifik. Untuk Kalimantan, wilayah yang pertama didarati oleh Jepang adalah Pulau Tarakan. Untuk wilayah Sulawesi, pelabuhan Bitung di Manado. Sedangkan untuk wilayah Maluku Utara, Pulau Morotai-lah yang menjadi titik pendaratan. Dari akhir Desember 1941 hingga pertengahan Februari 1942 berturut-turut kota-kota besar di tiga wilayah tersebut berhasil diduduki.

Pada 29 Desember 1941, Tambalan di Kalimantan Barat Daya berhasil dikuasai oleh Jepang. Prioritas Jepang yang ingin mendapatkan eksploitasi atas minyak bumi di Hindia Belanda menjadikan serangannya berpusat pada wilayah penghasil sumber daya alam terbatas tersebut. Upaya tersebut diwujudkan dengan dikuasainya

Tarakan pada 11 Januari 1942 yang merupakan pusat eksploitasi minyak BPM (Bataafsche Petroleum Maatschappi) di Kalimantan Timur. Selanjutnya berturut-turut kota Samarinda, Kotabangun dan Banjarmasin. Setelah kota-kota penghasil minyak dikuasai, Jepang semakin fokus untuk memegang pos-pos penting yang terdapat di tiap pulau di Indonesia.

Setelah berhasil menguasai seluruh wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Maluku, maka serangan selanjutnya diarahkan ke Pulau Jawa yang menjadi pusat aktivitas pemerintahan Hindia Belanda. Fokus utamanya tentu saja adalah Batavia yang berhasil ditaklukkan pada 4 Maret 1942. Armada Jepang merapat di pantai utara Jawa Barat dengan tujuan menguasai kota Bandung sebagai salah satu basis militer Belanda di Indonesia. Pada 8-9 Maret 1942 Gubernur Jenderal Hindia Belanda Tjarda van Starckenborgh, Panglima Perang Jenderal Ter Poorten dan Panglima Perang Jepang Jenderal Imamura bertemu di Kalijati Subang untuk menandatangani

kapitulasi Belanda kepada Jepang. Penandatanganan penyerahan resmi tersebut menandai berakhirnya kekuasaan Hindia Belanda di Indonesia.

## Propaganda Jepang: Kerjasama Demi Indonesia Merdeka

Pemerintah Jepang merancang propaganda untuk menarik simpati rakyat Indonesia agar mau bersama-sama terjun dalam perang melawan sekutu. Propaganda yang disampaikan yaitu menyatakan bahwa Jepang sebagai saudara tua bangsa Indonesia yang memiliki keinginan untuk membuat kawasan persemakmuran di wilayah Asia Pasifik, untuk itu dilahirkan Gerakan 3A, yaitu:

1. Jepang Cahaya Asia
2. Jepang Pelindung Asia
3. Jepang Pemimpin Asia

Pemerintahan Jepang dipimpin Perdana Menteri Toyo, membuat kebijakan pembentukan Dewan Pertimbangan Pusat (Chuo Sangi In) pada 5 September 1943. Chuo Sangi In bertugas menjawab pertanyaan Saiko Shikikan dalam hal politik dan pemerintah. Chuo Sangi In juga berhak mengajukan usul kepada Saiko Shikikan. Rapat-rapat Chuo Sangi In membahas pengembangan pemerintah militer, mempertinggi derajat rakyat, penanganan pendidikan dan penerangan, masalah ekonomi dan industri, kemakmuran dan bantuan sosial, serta kesehatan.

Jepang membangkitkan jiwa patriotisme dan militansi di kalangan pemuda melalui militer. PETA (Pembela Tanah Air) didirikan sebagai wadah bagi para pemuda untuk belajar ilmu kemiliteran. Pembentukan pasukan PETA 3 Oktober 1943 dilakukan oleh Letjen Kumakici Harada melalui Osamu Seiri nomor 44. Jepang merekrut para pemuda untuk dijadikan sebagai tentara teritorial guna mempertahankan Pulau Jawa, Bali dan Sumatera jika pasukan Sekutu tiba. Tentara-tentara PETA mendapatkan pelatihan militer dari tentara Jepang. Peranan PETA sangat besar dalam upaya memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan karena menjadi inti dari kekuatan militer kita.

Tanpa disadari oleh pemerintahan pendudukan Jepang, segala fasilitas dan kesempatan yang diberikan kepada Indonesia yang berbungkus propaganda membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya dimanfaatkan oleh para tokoh perjuangan untuk menyusun sendiri demi mewujudkan cita-cita kemerdekaan.



44. Bentuk-bentuk pamflet propaganda buatan Jepang

## Romusha dan Revolusi Cinta Tanah Air



45. Kondisi para tenaga Romusha, kekurangan pangan, gizi buruk dan minim penanganan kesehatan

Luasnya daerah pendudukan Jepang, menyebabkan Jepang membutuhkan tenaga kerja untuk membangun sarana pertahanan, seperti lapangan udara, gudang bawah tanah, jalan raya dan jembatan. Pekerjaanya diambil dari desa-desa di Pulau Jawa yang padat melalui sistem kerja paksa yang dikenal dengan Romusha. Romusha mulai dilaksanakan sejak 1942-1945, untuk bekerja di wilayah Indonesia serta Asia Tenggara seperti Birma, Muangthai, Vietnam, Malaysia dan Serawak.

Romusha awalnya dilakukan secara sukarela dengan tempat kerja tidak jauh dari tempat tinggalnya, karena terdesak dalam perang Pasifik pengerahan tenaga kerja mulai disertai dengan paksaan. Setiap kepala keluarga diwajibkan menyerahkan seorang anak lelakinya untuk berangkat menjadi romusha. Romusha diperlakukan kasar dengan pekerjaan sangat berat, sementara kebutuhan makanan tidak cukup. Hal ini menjadikan banyak di antara romusha meninggal di tempat kerja karena sakit, kekurangan makan, kecapaian atau kecelakaan.

## Pemberontakan PETA: Puncak Kemarahan

Pemberontakan PETA di Kota Blitar pada 14 Februari 1945 dipimpin oleh Shodancho Supriyadi. Supriyadi dan rekan-rekannya adalah lulusan angkatan pertama pendidikan PETA di Bogor. Mereka dikembalikan ke daerah asalnya untuk bertugas di bawah Daidan (Batalyon) Blitar.

Nurani mereka tersentuh saat melihat penderitaan rakyat Indonesia yang diperlakukan buruk oleh tentara Jepang. Kondisi Romusha banyak yang tewas akibat kelaparan dan terkena berbagai macam penyakit tanpa diobati. Para prajurit PETA juga geram melihat kelakuan tentara-tentara Jepang yang suka melecehkan wanita-wanita Indonesia. Para wanita ini awalnya dijanjikan mendapatkan pendidikan di Jakarta, namun ternyata malah menjadi pemuas nafsu seksual para tentara Jepang.

Pertemuan-pertemuan rahasia sudah digelar sejak September 1944. Supriyadi merencanakan aksi itu sebagai sebuah revolusi menuju kemerdekaan. Mereka juga menghubungi komandan-komandan batalyon di berbagai wilayah lain untuk bersama-sama mengangkat senjata dan menggalang kekuatan rakyat. 14 Februari 1945 dipilih sebagai waktu yang tepat karena akan ada pertemuan seluruh anggota dan komandan PETA di Blitar, sehingga diharapkan anggota-anggota yang lain akan ikut bergabung. Tujuannya adalah untuk menguasai kota Blitar dan mengobarkan semangat pemberontakan di daerah-daerah lain.

Walaupun rencana pemberontakan telah dipersiapkan secara baik, akan tetapi terjadi hal yang tidak diduga. Tiba-tiba pimpinan tentara Kekaisaran Jepang memutuskan membatalkan pertemuan besar di Blitar. Selain itu, Kempetai ternyata

sudah mencium rencana aksi. Supriyadi pun cemas dan khawatir mereka ditangkap sebelum aksi dimulai.

Supriyadi beserta para komandan dan anggota PETA di Blitar dihadapkan pada posisi sulit. Apabila terus melanjutkan perlawanan, mereka akan kalah jumlah dibandingkan jumlah tentara Kekaisaran Jepang. Namun, jika perlawanan dibatalkan pun tentara Kekaisaran Jepang sudah mengetahui rencana aksi mereka, sehingga kemungkinan besar para pemberontak akan ditangkap, lalu dijatuhi hukuman yang sangat berat, yakni hukuman mati.

Tepat 14 Februari 1945 dini hari pukul 03.00 WIB, pasukan PETA pimpinan Supriyadi menembakkan mortir ke Hotel Sakura yang menjadi kediaman para perwira militer Kekaisaran Jepang. Markas Kempetai juga ditembaki senapan mesin. Akan tetapi ternyata kedua bangunan tersebut sudah dikosongkan, karena pihak Jepang telah mencium rencana aksi pemberontakan PETA. Dalam aksi yang lain, salah seorang bhadancho (bintara) PETA merobek poster bertuliskan "Indonesia Akan Merdeka" dan menggantinya dengan tulisan "Indonesia Sudah Merdeka!".

## Revolusi yang Gagal

Pemberontakan PETA tidak berjalan sesuai rencana. Supriyadi gagal menggerakkan satuan lain untuk memberontak dan rencana ini pun terbukti telah diketahui oleh pihak Jepang. Dalam waktu singkat, Jepang mengirimkan pasukan militer untuk memadamkan pemberontakan PETA. Para pemberontak pun terdesak.

Sebanyak 78 orang perwira dan prajurit PETA dari Blitar akhirnya ditangkap dan dijebloskan ke penjara untuk kemudian diadili di Jakarta. Sebanyak enam orang divonis hukuman mati di Ancol pada 16 Mei 1945, enam orang dipenjara seumur hidup dan sisanya dihukum sesuai dengan tingkat kesalahan.



46. Persidangan Mahkamah Militer Jepang terhadap tentara PETA pada Mei 1945

Akan tetapi, nasib Supriyadi tidak diketahui. Supriyadi menghilang secara misterius tanpa kabar. Ada yang meyakini Supriyadi tewas di tangan tentara Jepang dalam pertempuran. Selain itu juga ada yang meyakini Supriyadi tewas diterkam binatang buas di hutan-hutan sekitar Kota Blitar.



**BUNG KARNO**  
Cat Minyak di Kanvas  
100 x 80 cm  
Koleksi Museum Basoeki Abdullah

## Jepang Terdesak, Kemerdekaan Semakin Dekat



47. Suasana Sidang BPUPKI 29 Mei – 1 Juni 1945



48. Sidang BPUPKI 1 Juni 1945 saat Soekarno menyampaikan buah pikirannya mengenai dasar negara "Pancasila".



49. Pembentukan PPKI ditandai berangkatnya utusan Indonesia ke Dalat Vietnam untuk menemui Marsekal Terauchi

dari Sulawesi, 1 wakil dari Kalimantan, 1 wakil dari Sunda Kecil, 1 wakil dari Maluku dan 1 wakil dari golongan penduduk Cina. Soekarno ditunjuk sebagai ketua, Moh Hatta sebagai wakil ketua, dan Mr. Ahmad Subardjo sebagai penasehat.

Pada 9 Agustus 1945 Soekarno, Moh Hatta dan Dokter Radjiman Wediodiningrat berangkat menuju Dalat (Vietnam), memenuhi panggilan Marsekal

Akhir 1944 Jepang mulai terdesak dalam Perang Asia Timur Raya, bayang-bayang kekalahan Jepang mulai nampak karena seluruh garis pertahanan Jepang di Pasifik sudah hancur oleh serangan sekutu. Pada 1 Maret 1945 dalam situasi kritis, Letnan Jendral Kumakici Harada, pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dengan anggota sebanyak 60 orang.

Pembentukan BPUPKI bertujuan menyelidiki hal-hal penting menyangkut pembentukan negara Indonesia merdeka. Pengangkatan pengurus BPUPKI diumumkan pada 29 April 1945, dengan ketua K.R.T. Radjiman Wediodiningrat. Jabatan ketua muda

pertama dijabat oleh *Shucokan* Cirebon yang bernama Icibangase. Kepala Sekretariat dijabat oleh R.P. Suroso dibantu Toyohito Masuda dan Mr. A.G. Pringgodigdo.

Pada 7 Agustus 1945 pemerintah pendudukan Jepang membubarkan BPUPKI, diganti dengan Panitia Persiapan Kemedekaan Indonesia (PPKI). Gunseikan Mayor Jenderal Yamamoto menegaskan bahwa anggota PPKI dipilih oleh Marsekal Terauchi yang menjadi penguasa perang tertinggi di seluruh Asia Tenggara. Anggota PPKI berjumlah 21 orang, terdiri dari 12 wakil dari Jawa, 3 wakil dari Sumatera, 2 wakil

Terauci. Pada 12 Agustus 1945 Marsekal Terauci menyampaikan bahwa Pemerintah Jepang memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, pelaksanaannya dapat dilakukan segera setelah PPKI menyelesaikan persiapannya. Wilayah Indonesia nantinya meliputi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda.



50. Jamur raksasa hasil dijatuhkannya bom atom



51. Suasana penandatanganan kekalahan Jepang kepada Sekutu di atas Kapal USS Missouri di Teluk Tokyo pada 2 September 1945

Pada 6 dan 9 Agustus 1945 pukul 8.15 waktu Jepang, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki dari ketinggian hampir 10 ribu meter. Bom atom *Little Boy* dengan panjang 3 meter, lebar 71 cm dan berat 4000 Kg dibawa oleh pesawat B-29 Enola Gay. Ratusan ribu orang meninggal seketika, sisanya terluka seumur hidup, dan hanya sedikit yang sanggup untuk bertahan.

Pengeboman tersebut melumpuhkan kondisi politik dan ekonomi Jepang, karena itu pada 14 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Pada 15 Agustus 1945 Kaisar Hirohito menyampaikan pidato di Radio NHK yang dikenal sebagai *Siaran Suara Kaisar*. Hirohito membacakan Perintah Kekaisaran tentang kapitulasi, sekaligus mengumumkan kepada rakyat bahwa Jepang telah menyerah. Upacara kapitulasi akan dilaksanakan pada 2 September 1945 di atas kapal tempur Amerika Serikat USS Missouri.

Di wilayah Maluku Utara sendiri kondisi tersebut berubah saat tentara sekutu mulai membalikkan keadaan dengan pengeboman pada dua kota penting di Jepang, Hiroshima dan Nagasaki. Pada 1945 Jepang takluk kepada pasukan sekutu yang mampu mengebom Kota Hiroshima dan Nagasaki. Setelah Jepang takluk kepada sekutu, pasukan Belanda yang sudah mengalahkan Jepang menuju ke Ternate melalui Pulau Hiri, Morotai dan beberapa wilayah lain.

Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu, komando sekutu di Morotai memerintahkan agar pasukan Jepang segera menyerahkan segala peralatan tempur dan persenjataan yang dimiliki kepada pasukan sekutu. Seluruh persenjataan harus dimusnahkan dan akan dilakukan pemulangan seluruh komponen pasukan Jepang termasuk Heiho. Mereka diminta untuk berkumpul di Kao. Namun bagi para perwira Jepang dan beberapa anggota Kempetai yang dipandang sebagai penjahat perang diminta untuk menyerahkan diri ke Morotai. Untuk memusnahkan peralatan perangnya, pasukan Jepang membutuhkan waktu sekitar 1 bulan. Beberapa persenjataan yang sulit untuk dimusnahkan banyak ditenggelamkan di laut atau dibenamkan di Danau Galela.

## Detik-Detik Proklamasi

Pada 15 Agustus 1945 golongan pemuda mendengar berita kekalahan Jepang dari radio BBC Inggris. Mereka segera mengadakan rapat pada pukul 20.00 WIB di gedung *Bacteriologis Laboratorium* Pegangsaan Timur. Rapat dipimpin oleh Chairul Saleh dan memutuskan agar kemerdekaan harus segera diproklamasikan tanpa campur tangan bangsa asing.

Wikana dan Darwis ditugaskan untuk menyampaikan keputusan rapat kepada Soekarno atau Moh Hatta, kedua utusan tersebut diterima oleh Soekarno di **Pegangsaan Timur 56** pukul 22.00 WIB. Soekarno mengatakan berita tentang kekalahan Jepang belum diketahuinya. Pukul 23.30 WIB Wikana dan Darwis menuju tempat rapat golongan pemuda di Asrama Baperpi (Badan Permusyawaratan Pelajar Indonesia) Jalan Cikini 71 untuk melaporkan hasil pertemuannya dengan Soekarno dan Moh Hatta. Rapat golongan pemuda di Jalan Cikini 71 memutuskan untuk membawa Soekarno dan Moh Hatta ke luar kota. Sukarni, Jusuf Kunto, Chairul Saleh, Singgih dan Muwardi ditugaskan membawa Soekarno dan Moh Hatta ke Rengasdengklok, Karawang, Jawa Barat. Rumah Djiauw Kie Siong dijadikan sebagai tempat tinggal Soekarno dan Moh/ Hatta. Peristiwa tersebut terjadi pada 16 Agustus 1945 pukul 04.00 WIB.

Hilangnya Soekarno dan Moh Hatta dari Jakarta membuat panik anggota PPKI, mereka kemudian mengutus Ahmad Soebardjo untuk menjemput Soekarno dan Moh Hatta dari Rengasdengklok. Golongan pemuda mengizinkan Soekarno dan Moh Hatta kembali ke Jakarta setelah Ahmad Soebardjo memberikan jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan 17 Agustus 1945.



**52. Rumah Laksamana Tadashi Maeda**  
(rumah saat menjadi markas tentara Inggris September 1945)

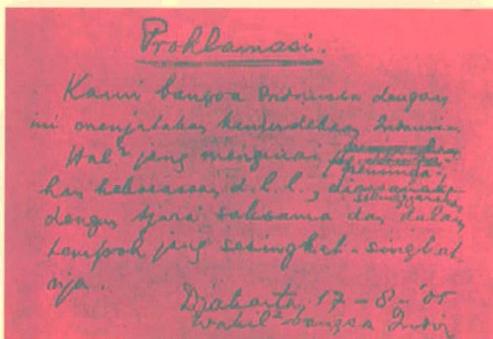
Soekarno, Moh Hatta, dan Ahmad Soebardjo kembali ke Jakarta dan menuju ke rumah Laksamana Tadashi Maeda untuk meminjam rumahnya sebagai tempat perumusan naskah proklamasi. Mereka diterima oleh Laksamana Tadashi Maeda pukul 22.00 WIB. Setelah Maeda mengizinkan, maka Soekarno, Moh Hatta dan Ahmad



53. Ruang Tamu yang digunakan oleh Laksamana Maeda saat menerima Soekarno, Moh Hatta dan Ahmad Soebardjo



54. Ruang Makan yang digunakan untuk merumuskan konsep naskah proklamasi



55. Konsep naskah proklamasi tulisan tangan Soekarno



56. Naskah proklamasi hasil ketikan Sayuti Melik

Soebardjo mulai merumuskan naskah proklamasi. Soekarno menuliskan konsep di atas searik kertas, sedangkan Moh Hatta dan Ahmad Soebardjo menyumbangkan pikiran secara lisan.

Konsep naskah proklamasi rumusan Soekarno, Moh Hatta dan Ahmad Soebardjo kemudian didiskusikan untuk mendapatkan persetujuan dari hadirin yang berjumlah 40-50 orang. Rumusan tersebut akhirnya disetujui oleh semua hadirin, mereka juga memutuskan Soekarno dan Moh Hatta yang menandatangani naskah proklamasi dan pembacaan naskah Proklamasi akan dilaksanakan pada pukul 10.00 WIB di rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur No. 56.

Soekarno meminta Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi. Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi ditemani oleh B.M. Diah. Pada saat pengetikan, Sayuti Melik melakukan tiga perubahan kata yaitu "Tempoh" menjadi "Tempo", "Wakil-wakil bangsa Indonesia" menjadi "Atas nama bangsa Indonesia", dan penulisan hari, bulan dan tahun. Teks naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Moh Hatta atas nama bangsa Indonesia. Peristiwa ini berlangsung menjelang subuh hari Jum'at 17 Agustus 1945.

## Indonesia Merdeka: Puncak Pengorbanan Seluruh Rakyat Indonesia

Pada 17 Agustus 1945 pukul 10.00 WIB, Soekarno didampingi Moh Hatta membacakan teks Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta. Setelah naskah teks proklamasi dibacakan, selanjutnya dikibarkan bendera Merah Putih oleh Latief Hendraningrat dan Suhud Sastro Kusumo serta menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sang Saka Merah yang dikibarkan dijahit oleh Ibu Fatmawati.



#### 57. Proklamasi 17 Agustus 1945

Soekarno membacakan naskah proklamasi dengan didampingi oleh Moh Hatta. Latief Hendraningrat berdiri sebelah kanan Soekarno. Sedangkan di bagian belakang nampak Fatmawati, Soewiryo, Johannes Latuharhary dan Iwa Kusuma Sumantri

Selanjutnya pada 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengadakan sidang dan memutuskan:

1. Mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Undang-Undang Dasar 1945.
2. Memilih Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Moh Hatta sebagai wakil presiden.
3. Membentuk sebuah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) untuk membantu presiden

Pada 19 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia kembali menggelar sidang dan memutuskan :

1. Membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi :
  - a. Jawa Barat, gubernurnya Soetardjo Kartohadikoesoemo
  - b. Jawa Tengah, gubernurnya R. Pandji Soeroso
  - c. Jawa Timur, gubernurnya R.A. Soeryo
  - d. Borneo (Kalimantan), gubernurnya Ir. Pangeran Muhammad Noor
  - e. Sulawesi, gubernurnya Dr. G.S.S.J. Sam Ratulangi
  - f. Maluku, gubernurnya Mr. J. Latuharhary
  - g. Sunda Kecil (Bali dan Nusa Tenggara), gubernurnya Mr. I. Gusti Ktut Pudja
  - h. Sumatra, gubernurnya Mr. Teuku Mohammad Hassan
2. Membentuk Komite Nasional Daerah
3. Menetapkan 12 departemen dan 4 menteri Negara.



**58. Suasana Sidang PPKI 18-23 Agustus 1945**

Pada 22 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia kembali melaksanakan sidang, keputusan dalam sidang tersebut adalah :

1. Pembentukan Komite Nasional
2. Membentuk Partai Nasional Indonesia
3. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat

Selanjutnya pada 2 September 1945 presiden melantik kabinet pertama yang bertugas untuk membantu pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden. Kabinet pertama dipimpin oleh Presiden Soekarno dengan susunan 12 departemen dan 4 kementerian Negara:

1. Departemen Dalam Negeri dikepalai R.A.A. Wiranata Kusumah
2. Departemen Luar Negeri dikepalai Mr. Ahmad Subardjo.
3. Departemen Kehakiman dikepalai Prof. Dr. Mr. Supomo.
4. Departemen Keuangan dikepalai Mr. A.A Maramis.
5. Departemen Kemakmuran dikepalai Surachman Cokroadisurjo.
6. Departemen Kesehatan dikepalai Dr. Buntaran Martoatmojo.
7. Departemen Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan dikepalai Ki Hajar Dewantara.
8. Departemen Sosial dikepalai Iwa Kusumasumantri.
9. Departemen Pertahanan dikepalai Supriyadi.
10. Departemen Perhubungan dikepalai Abikusno Tjokrosuyoso.
11. Departemen Pekerjaan Umum dikepalai Abikusno Tjokrosuyoso.
12. Departemen Penerangan dikepalai Mr. Amir Syarifudin

Jabatan menteri negara diduduki oleh Wachid Hasyim, M. Amir, R. Otto Iskandardinata, dan R.M Sartono. Di samping itu diangkat pula beberapa pejabat tinggi negara, Dr. Mr. Kusumaatmaja diangkat sebagai Ketua Mahkamah Agung, Mr. Gatot Tarunamihardja sebagai Jaksa Agung, Mr. A.G. Pringgodigdo sebagai Sekretaris Negara, dan Soekarjo Wirjopranoto sebagai Juru Bicara Negara.

## **Situasi Proklamasi di Ternate Maluku Utara**

Dalam rangka penyerahan kekuasaan dari Jepang kepada sekutu, aparat pemerintahan termasuk perangkat desa dari Ternate dan Tidore dikumpulkan oleh Jepang pada 25 Agustus 1945. Jepang pada saat itu mengatakan bahwa mereka telah kalah perang dan akan meninggalkan Ternate dan Tidore untuk kembali ke negeri Jepang. Dalam pertemuan tersebut para pemuka pemerintahan Ternate dan Tidore diminta untuk memilih kepala daerah sementara untuk menggantikan penyerahan kekuasaan secara resmi. Hal ini disebabkan karena Sultan Ternate, Muhammad Jabir Syah sedang berada di Australia dalam rangka diamankan sekutu.

Dalam pertemuan tersebut kemudian diputuskan bahwa yang akan menggantikan sebagai kepala daerah adalah dr. Chasan Boesoire, seorang tokoh masyarakat dan juga Kepala Dinas Kesehatan di Ternate. Beliau kemudian dikukuhkan sebagai pejabat sementara dari daerah Maluku Utara yang akan menerima penyerahan kekuasaan dari Jepang.

Berita mengenai proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 di Ternate datang terlambat setelah proklamasi, yaitu pada September 1945. Hal ini dikarenakan faktor jarak dan komunikasi yang ada saat itu masih sangat terbatas, tidak memungkinkan untuk saling berkomunikasi. Selain itu, sejak kedatangan Jepang di Maluku Utara, semua akses komunikasi dilarang oleh Jepang, terutama siaran radio dari luar negeri. Kondisi ini berbeda dengan daerah Morotai yang langsung mengetahui berita mengenai proklamasi kemerdekaan tersebut selang beberapa hari setelah diumumkan. Hal ini dikarenakan faktor fasilitas komunikasi radio militer sekutu yang lengkap sehingga dapat langsung mengetahui perkembangan yang terjadi. Sedangkan di Galela, militer Jepang justru memberitahukan bahwa sudah ada proklamasi kemerdekaan yang dilakukan di Jakarta sehingga masyarakat dapat segera saling mengetahuinya.

Penyebaran selanjutnya adalah melalui para pengungsi yang tinggal di Morotai ke daerah asalnya masing-masing. Sebagai wilayah basis pertahanan sekutu, Morotai memiliki akses fasilitas komunikasi dan radio militer yang lengkap. Begitu berita mengenai proklamasi diketahui, maka para pengungsi yang tinggal di Morotai lantas kembali ke wilayahnya masing-masing dan membawa berita tersebut hingga ke wilayah Halmahera Utara, Halmahera Tengah dan Halmahera Timur.

Beberapa pemimpin lokal yang telah mengetahui berita ini kemudian melakukan pertemuan untuk mengantisipasi proklamasi kemerdekaan Indonesia tersebut. Para pemimpin lokal tersebut adalah M.A. Kamaruddin, Arnold Manonutu, Chasan Boesoire, M.S. Jahir, M. Arsyad Hanafi, Abubakar Bachmid dan tokoh pemuda Abjan Soleman. Mereka melihat bahwa Belanda melalui Sekutu perlahan tapi pasti mulai berusaha untuk mengembalikan kekuasaannya di Maluku Utara. Beberapa gerakan pemuda juga lantas berinisiatif untuk merebut senjata dari gudang senjata di pelabuhan yang kemudian dibawa menuju kota. Perebutan senjata ini dilakukan oleh kelompok pemuda yang dibantu oleh anggota Heiho.

Rupanya, tersebar luasnya berita mengenai kekalahan dan penyerahan Jepang kepada sekutu serta proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jakarta yang sudah mulai menyebar di masyarakat menjadikan pasukan sekutu takut akan terjadi situasi yang tidak dapat dikendalikan nantinya. Oleh karena itu, dikirim semacam pasukan "gerilya" buatan Belanda yang bertugas untuk mengawasi dan memantau keadaan yang terjadi. Namun dalam prakteknya, pasukan gerilya tersebut juga melakukan pembunuhan terhadap kaum nasionalis yang pro dengan republik. Pasukan tersebut berasal dari Morotai, Pulau Hiri dan beberapa wilayah lainnya yang dipimpin oleh Muhammad Badar dan H. Djalil yang bermarkas di Koloncucu Ternate. Pasukan gerilya tersebut diyakini merupakan pasukan pembersih dan pemantau keadaan sebelum pasukan *Nederlands Indies Civil Administration/NICA* masuk ke Ternate. Pasukan gerilya tersebut berhenti melakukan teror dan ancaman kepada masyarakat setelah kedatangan Sultan Ternate dari Australia pada 12 Oktober 1945.



58. Suasana Sidang PPKI 18-23 Agustus 1945

Pada 22 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia kembali melaksanakan sidang, keputusan dalam sidang tersebut adalah :

1. Pembentukan Komite Nasional
2. Membentuk Partai Nasional Indonesia
3. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat

Selanjutnya pada 2 September 1945 presiden melantik kabinet pertama yang bertugas untuk membantu pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden. Kabinet pertama dipimpin oleh Presiden Soekarno dengan susunan 12 departemen dan 4 kementerian Negara:

1. Departemen Dalam Negeri dikepalai R.A.A. Wiranata Kusumah
2. Departemen Luar Negeri dikepalai Mr. Ahmad Subardjo.
3. Departemen Kehakiman dikepalai Prof. Dr. Mr. Supomo.
4. Departemen Keuangan dikepalai Mr. A.A Maramis.
5. Departemen Kemakmuran dikepalai Surachman Cokroadisurjo.
6. Departemen Kesehatan dikepalai Dr. Buntaran Martoatmojo.
7. Departemen Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan dikepalai Ki Hajar Dewantara.
8. Departemen Sosial dikepalai Iwa Kusumasumantri.
9. Departemen Pertahanan dikepalai Supriyadi.
10. Departemen Perhubungan dikepalai Abikusno Tjokrosuyoso.
11. Departemen Pekerjaan Umum dikepalai Abikusno Tjokrosuyoso.
12. Departemen Penerangan dikepalai Mr. Amir Syarifudin

Jabatan menteri negara diduduki oleh Wachid Hasyim, M. Amir, R. Otto Iskandardinata, dan R.M Sartono. Di samping itu diangkat pula beberapa pejabat tinggi negara, Dr. Mr. Kusumaatmaja diangkat sebagai Ketua Mahkamah Agung, Mr. Gatot Tarunamihardja sebagai Jaksa Agung, Mr. A.G. Pringgodigdo sebagai Sekretaris Negara, dan Soekarjo Wirjopranoto sebagai Juru Bicara Negara.

## Situasi Proklamasi di Ternate Maluku Utara

Dalam rangka penyerahan kekuasaan dari Jepang kepada sekutu, aparat pemerintahan termasuk perangkat desa dari Ternate dan Tidore dikumpulkan oleh Jepang pada 25 Agustus 1945. Jepang pada saat itu mengatakan bahwa mereka telah kalah perang dan akan meninggalkan Ternate dan Tidore untuk kembali ke negeri Jepang. Dalam pertemuan tersebut para pemuka pemerintahan Ternate dan Tidore diminta untuk memilih kepala daerah sementara untuk menggantikan penyerahan kekuasaan secara resmi. Hal ini disebabkan karena Sultan Ternate, Muhammad Jabir Syah sedang berada di Australia dalam rangka diamankan sekutu.

Dalam pertemuan tersebut kemudian diputuskan bahwa yang akan menggantikan sebagai kepala daerah adalah dr. Chasan Boesoire, seorang tokoh masyarakat dan juga Kepala Dinas Kesehatan di Ternate. Beliau kemudian dikukuhkan sebagai pejabat sementara dari daerah Maluku Utara yang akan menerima penyerahan kekuasaan dari Jepang.

Berita mengenai proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 di Ternate datang terlambat setelah proklamasi, yaitu pada September 1945. Hal ini dikarenakan faktor jarak dan komunikasi yang ada saat itu masih sangat terbatas, tidak memungkinkan untuk saling berkomunikasi. Selain itu, sejak kedatangan Jepang di Maluku Utara, semua akses komunikasi dilarang oleh Jepang, terutama siaran radio dari luar negeri. Kondisi ini berbeda dengan daerah Morotai yang langsung mengetahui berita mengenai proklamasi kemerdekaan tersebut selang beberapa hari setelah diumumkan. Hal ini dikarenakan faktor fasilitas komunikasi radio militer sekutu yang lengkap sehingga dapat langsung mengetahui perkembangan yang terjadi. Sedangkan di Galela, militer Jepang justru memberitahukan bahwa sudah ada proklamasi kemerdekaan yang dilakukan di Jakarta sehingga masyarakat dapat segera saling mengetahuinya.

Penyebaran selanjutnya adalah melalui para pengungsi yang tinggal di Morotai ke daerah asalnya masing-masing. Sebagai wilayah basis pertahanan sekutu, Morotai memiliki akses fasilitas komunikasi dan radio militer yang lengkap. Begitu berita mengenai proklamasi diketahui, maka para pengungsi yang tinggal di Morotai lantas kembali ke wilayahnya masing-masing dan membawa berita tersebut hingga ke wilayah Halmahera Utara, Halmahera Tengah dan Halmahera Timur.

Beberapa pemimpin lokal yang telah mengetahui berita ini kemudian melakukan pertemuan untuk mengantisipasi proklamasi kemerdekaan Indonesia tersebut. Para pemimpin lokal tersebut adalah M.A. Kamaruddin, Arnold Manonutu, Chasan Boesoire, M.S. Jahir, M. Arsyad Hanafi, Abubakar Bachmid dan tokoh pemuda Abjan Soleman. Mereka melihat bahwa Belanda melalui Sekutu perlahan tapi pasti mulai berusaha untuk mengembalikan kekuasaannya di Maluku Utara. Beberapa gerakan pemuda juga lantas berinisiatif untuk merebut senjata dari gudang senjata di pelabuhan yang kemudian dibawa menuju kota. Perebutan senjata ini dilakukan oleh kelompok pemuda yang dibantu oleh anggota Heiho.

Rupanya, tersebar luasnya berita mengenai kekalahan dan penyerahan Jepang kepada sekutu serta proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jakarta yang sudah mulai menyebar di masyarakat menjadikan pasukan sekutu takut akan terjadi situasi yang tidak dapat dikendalikan nantinya. Oleh karena itu, dikirim semacam pasukan "gerilya" buatan Belanda yang bertugas untuk mengawasi dan memantau keadaan yang terjadi. Namun dalam prakteknya, pasukan gerilya tersebut juga melakukan pembunuhan terhadap kaum nasionalis yang pro dengan republik. Pasukan tersebut berasal dari Morotai, Pulau Hiri dan beberapa wilayah lainnya yang dipimpin oleh Muhammad Badar dan H. Djalil yang bermarkas di Koloncucu Ternate. Pasukan gerilya tersebut diyakini merupakan pasukan pembersih dan pemantau keadaan sebelum pasukan *Nederlands Indies Civil Administration/NICA* masuk ke Ternate. Pasukan gerilya tersebut berhenti melakukan teror dan ancaman kepada masyarakat setelah kedatangan Sultan Ternate dari Australia pada 12 Oktober 1945.



58. Suasana Sidang PPKI 18-23 Agustus 1945

Pada 22 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia kembali melaksanakan sidang, keputusan dalam sidang tersebut adalah :

1. Pembentukan Komite Nasional
2. Membentuk Partai Nasional Indonesia
3. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat

Selanjutnya pada 2 September 1945 presiden melantik kabinet pertama yang bertugas untuk membantu pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden. Kabinet pertama dipimpin oleh Presiden Soekarno dengan susunan 12 departemen dan 4 kementerian Negara:

1. Departemen Dalam Negeri dikepalai R.A.A. Wiranata Kusumah
2. Departemen Luar Negeri dikepalai Mr. Ahmad Subardjo.
3. Departemen Kehakiman dikepalai Prof. Dr. Mr. Supomo.
4. Departemen Keuangan dikepalai Mr. A.A Maramis.
5. Departemen Kemakmuran dikepalai Surachman Cokroadisurjo.
6. Departemen Kesehatan dikepalai Dr. Buntaran Martoatmojo.
7. Departemen Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan dikepalai Ki Hajar Dewantara.
8. Departemen Sosial dikepalai Iwa Kusumasumantri.
9. Departemen Pertahanan dikepalai Supriyadi.
10. Departemen Perhubungan dikepalai Abikusno Tjokrosuyoso.
11. Departemen Pekerjaan Umum dikepalai Abikusno Tjokrosuyoso.
12. Departemen Penerangan dikepalai Mr. Amir Syarifudin

Jabatan menteri negara diduduki oleh Wachid Hasyim, M. Amir, R. Otto Iskandardinata, dan R.M Sartono. Di samping itu diangkat pula beberapa pejabat tinggi negara, Dr. Mr. Kusumaatmaja diangkat sebagai Ketua Mahkamah Agung, Mr. Gatot Tarunamihardja sebagai Jaksa Agung, Mr. A.G. Pringgodigdo sebagai Sekretaris Negara, dan Soekarjo Wirjopranoto sebagai Juru Bicara Negara.

## Situasi Proklamasi di Ternate Maluku Utara

Dalam rangka penyerahan kekuasaan dari Jepang kepada sekutu, aparat pemerintahan termasuk perangkat desa dari Ternate dan Tidore dikumpulkan oleh Jepang pada 25 Agustus 1945. Jepang pada saat itu mengatakan bahwa mereka telah kalah perang dan akan meninggalkan Ternate dan Tidore untuk kembali ke negeri Jepang. Dalam pertemuan tersebut para pemuka pemerintahan Ternate dan Tidore diminta untuk memilih kepala daerah sementara untuk menggantikan penyerahan kekuasaan secara resmi. Hal ini disebabkan karena Sultan Ternate, Muhammad Jabir Syah sedang berada di Australia dalam rangka diamankan sekutu.

Dalam pertemuan tersebut kemudian diputuskan bahwa yang akan menggantikan sebagai kepala daerah adalah dr. Chasan Boesoire, seorang tokoh masyarakat dan juga Kepala Dinas Kesehatan di Ternate. Beliau kemudian dikukuhkan sebagai pejabat sementara dari daerah Maluku Utara yang akan menerima penyerahan kekuasaan dari Jepang.

Berita mengenai proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 di Ternate datang terlambat setelah proklamasi, yaitu pada September 1945. Hal ini dikarenakan faktor jarak dan komunikasi yang ada saat itu masih sangat terbatas, tidak memungkinkan untuk saling berkomunikasi. Selain itu, sejak kedatangan Jepang di Maluku Utara, semua akses komunikasi dilarang oleh Jepang, terutama siaran radio dari luar negeri. Kondisi ini berbeda dengan daerah Morotai yang langsung mengetahui berita mengenai proklamasi kemerdekaan tersebut selang beberapa hari setelah diumumkan. Hal ini dikarenakan faktor fasilitas komunikasi radio militer sekutu yang lengkap sehingga dapat langsung mengetahui perkembangan yang terjadi. Sedangkan di Galela, militer Jepang justru memberitahukan bahwa sudah ada proklamasi kemerdekaan yang dilakukan di Jakarta sehingga masyarakat dapat segera saling mengetahuinya.

Penyebaran selanjutnya adalah melalui para pengungsi yang tinggal di Morotai ke daerah asalnya masing-masing. Sebagai wilayah basis pertahanan sekutu, Morotai memiliki akses fasilitas komunikasi dan radio militer yang lengkap. Begitu berita mengenai proklamasi diketahui, maka para pengungsi yang tinggal di Morotai lantas kembali ke wilayahnya masing-masing dan membawa berita tersebut hingga ke wilayah Halmahera Utara, Halmahera Tengah dan Halmahera Timur.

Beberapa pemimpin lokal yang telah mengetahui berita ini kemudian melakukan pertemuan untuk mengantisipasi proklamasi kemerdekaan Indonesia tersebut. Para pemimpin lokal tersebut adalah M.A. Kamaruddin, Arnold Manonutu, Chasan Boesoire, M.S. Jahir, M. Arsyad Hanafi, Abubakar Bachmid dan tokoh pemuda Abjan Soleman. Mereka melihat bahwa Belanda melalui Sekutu perlahan tapi pasti mulai berusaha untuk mengembalikan kekuasaannya di Maluku Utara. Beberapa gerakan pemuda juga lantas berinisiatif untuk merebut senjata dari gudang senjata di pelabuhan yang kemudian dibawa menuju kota. Perebutan senjata ini dilakukan oleh kelompok pemuda yang dibantu oleh anggota Heiho.

Rupanya, tersebar luasnya berita mengenai kekalahan dan penyerahan Jepang kepada sekutu serta proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jakarta yang sudah mulai menyebar di masyarakat menjadikan pasukan sekutu takut akan terjadi situasi yang tidak dapat dikendalikan nantinya. Oleh karena itu, dikirim semacam pasukan "gerilya" buatan Belanda yang bertugas untuk mengawasi dan memantau keadaan yang terjadi. Namun dalam prakteknya, pasukan gerilya tersebut juga melakukan pembunuhan terhadap kaum nasionalis yang pro dengan republik. Pasukan tersebut berasal dari Morotai, Pulau Hiri dan beberapa wilayah lainnya yang dipimpin oleh Muhammad Badar dan H. Djalil yang bermarkas di Koloncucu Ternate. Pasukan gerilya tersebut diyakini merupakan pasukan pembersih dan pemantau keadaan sebelum pasukan *Nederlands Indies Civil Administration/NICA* masuk ke Ternate. Pasukan gerilya tersebut berhenti melakukan teror dan ancaman kepada masyarakat setelah kedatangan Sultan Ternate dari Australia pada 12 Oktober 1945.

## Kembalinya Sultan Ternate dari Pengasingan

Belanda melihat bahwa dalam struktur sosial dan politik, kedudukan Sultan Ternate masih kuat dengan kepatuhan rakyat terhadapnya. Pola penguasaan suatu wilayah dengan menundukkan raja sangat dipelajari Belanda dalam upaya terus menanamkan pengaruh dan kekuasaannya di Indonesia. Mencermati perkembangan politik yang terjadi dalam masa pendudukan Jepang, maka Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Dr. H.J. van Mook yang sedang dalam pengungsian di Australia lantas menyurati Sultan Ternate pada September 1944. Sultan setuju usul van Mook agar dia dan keluarganya segera mengungsi ke Australia. Maka sesuai dengan yang direncanakan, Sultan dan keluarga lantas dibawa ke Morotai terlebih dahulu dan dengan bantuan dari Sekutu, Sultan dan keluarganya kemudian dibawa ke Australia pada 8 Oktober 1944.

Kekalahan Jepang terhadap sekutu yang diikuti dengan penyerahan kekuasaan Jepang atas Indonesia menjadikan kondisi politik berubah. Pada 17 Agustus 1945, Indonesia menyatakan diri kemerdekaannya di Jakarta. Informasi mengenai kekalahan Jepang atas sekutu dan kemerdekaan Indonesia sampai di Ternate. Kepentingan Belanda untuk kembali menjejakkan kakinya di Maluku Utara diiringi dengan kebutuhan untuk dapat menegosiasikan kehadirannya di masyarakat Maluku Utara. Untuk itu, maka pada 12 Oktober 1945 Sultan Ternate Muhammad Iskandar Djabir Syah dan keluarganya juga dikembalikan dari pengungsian di Australia. Sultan Ternate pulang ke Ternate dengan dikawal oleh dua korve Australia. Ketika merapat di dermaga Ternate, Sultan yang sudah mendapat pangkat sebagai Letnan Kolonel Titular KNIL dikawal oleh beberapa serdadu Australia dan beberapa perwira NICA. Selama di Australia, Sultan juga telah menjalin kontak intensif dengan pemerintah Hindia Belanda dalam pengasingan di Australia yang dipimpin oleh Van Mook. Setelah Sultan kembali, Maluku Utara kembali memperoleh status sebagai daerah karesidenan dan Sultan Ternate Muhammad Jabir Syah diangkat sebagai Residennya.

Setelah Sultan Ternate tiba, Boesoire menyerahkan jabatan kepala daerah sementara kepada sultan. Dengan pengangkatannya sebagai Residen yang membawahi dua *Afdeling Noord Molukken* dan *Afdeling Tidore*, Sultan mulai menjalankan pemerintahannya sebagai pejabat sipil. Selain itu juga terjadi beberapa perubahan dalam bidang struktur pemerintahan di Maluku Utara. Morotai, Bacan dan Tidore ditingkatkan statusnya sebagai daerah swapraja. Status swapraja ini kemudian ditingkatkan menjadi *Afdeling* dan merupakan bagian di bawah Karesidenan Maluku Utara.

Hal menarik yang terjadi pada saat Sultan kembali ke Ternate, setelah dilakukan penyerahan kekuasaan sementara dari Chasan Boesoeri kepada Sultan, Sultan kemudian mengadakan inspeksi di dalam Benteng Fort Orange. Para rombongan kedatangan dibawa ke belakang benteng untuk melakukan upacara penghormatan. Upacara penghormatan yang dilakukan pada saat itu dilakukan dengan mengibarkan bendera merah putih. Namun pasukan Australia yang mengantar Sultan Ternate tidak menyukai hal tersebut dan meminta agar bendera Belanda lah yang dikibarkan. Untuk menghindari keributan yang akan terjadi, maka kemudian bendera Belanda dapat berkibar di Benteng Fort Orange, Gedung Residen

dan Istana Sultan Ternate. Sebagai seorang letnan kolonel Belanda, Sultan membolehkan pengibaran bendera Belanda di kantor pemerintah Ternate.

Kekuasaan Sultan Ternate selaku Residen Belanda saat itu mengemban tugas untuk melaksanakan pemerintahan sementara yang akan mendukung keberadaan Belanda di Indonesia. Secara otomatis sultan yang telah diangkat sebagai residen oleh pemerintah Belanda adalah juga sebagai kepala swapraja dari Kesultanan Ternate. Pada Desember 1945, Dr. Van Hoven, komisaris Belanda untuk Kalimantan dan Indonesia Timur menemui Residen Jabir Syah. Kedatangannya adalah untuk menyampaikan bahwa rangkap jabatan yang dilakukan oleh Sultan Ternate yang merangkap jabatan baik sebagai Residen maupun kepala Swapraja tidak boleh dilakukan. Dalam pembicaraan yang dilakukan tersebut, Van Hoven meminta agar Sultan Jabir Syah melepaskan jabatannya salah satu. Jabir Syah menyatakan bahwa jabatan sebagai kepala Swapraja telah dilepaskan untuk para Bobatonya, meskipun demikian pertanggungjawaban tertinggi sebagai kepala pemerintahan tetap dipegang olehnya.

Dalam pertemuan tersebut, Jabir Syah juga mengemukakan konsep federasi swapraja antara Kesultanan Ternate, Tidore, Bacan dan Luwuk di Sulawesi Tengah. Luwuk dimasukkan ke dalam wilayah Swapraja tersebut dikarenakan pernah menjadi bagian dari Kesultanan Ternate hingga permulaan abad ke-20. Namun usulan tersebut ditolak oleh Van Hoven yang kemudian mengirim surat kepada Direktur Departemen Dalam Negeri Belanda yang melaporkan bahwa usulan tersebut tidak realistis dikarenakan kondisi yang tidak mungkin dilakukan.

Menindaklanjuti laporan tersebut kemudian pada Januari 1946, datang utusan dari Departemen Dalam Negeri Belanda di bawah pimpinan de Waal serta Kolonel Bosch. Tim tersebut datang dalam rangka reformasi administrasi pemerintahan untuk menghilangkan administrasi pemerintahan yang dibentuk oleh Jepang. Utusan tersebut mendatangi Sultan Jabir Syah dan meminta keperluan data dan kemudian melanjutkan ke Bali, Timor, Ambon, Manado, Sangir-Talaud, Gorontalo dan Poso. Selain meminta data, tim tersebut juga bertujuan untuk mengeliminir pihak atau pejabat pemerintah yang pro kepada republik. Karena hal itu, maka pada 7 April 1946 Gubernur Sulawesi Sam Ratulangi dan Gubernur Sunda Kecil, Ketut Pudja ditahan karena dianggap pro dengan republik.

Adapun Sultan Jabir Syah sendiri posisinya aman karena dalam laporan yang diberikan kepada de Wall, Jabir Syah mengungkapkan bahwa muncul organisasi-organisasi politik di Maluku Utara yang menginginkan kemerdekaan. Namun daerah ini masih tetap aman dan tidak terlalu peduli terhadap pemerintahan otokrasi yang akan berdiri kembali. Dalam hal ini Sultan menjamin bahwa kekuasaan kesultanan masih kuat untuk mereduksi kepentingan golongan pro republik. Sultan sendiri dalam laporan yang dibuat oleh tim tersebut justru lebih menginginkan pemerintahan yang demokratis yang dibentuk melalui ikatan federatif antara swapraja-swapraja Kesultanan Ternate, Tidore, Bacan dan Luwuk. Dalam benak Jabir Syah, berdasarkan pada analisis de Waal, menilai bahwa dengan menjadi daerah federasi swapraja, maka Maluku Utara memperoleh otonomi yang besar dan luas yang dapat menyumbangkan kekuasaan kepada pemerintah Hindia Belanda. Namun, usulan dari Sultan Jabir Syah ini ditolak oleh Pemerintah Hindia Belanda dengan surat keputusan 194 no. 27 yang mengumumkan bentuk swapraja baru yang terdiri dari Ternate, Tidore dan Bacan.

## Tokoh Proklamasi dari Maluku

### Mr. Johannes Latuharhary



59. Mr. Johannes Latuharhary

Johannes Latuharhary lahir pada 6 Juli 1900 di Pulau Haruku, Maluku. Ayahnya bernama Jan Latuharhary dan ibunya bernama Josefin Hiariej. Latuharhary merupakan sulung dari empat bersaudara.

Pendidikan Johannes bermula di Saparuasche School sebuah sekolah kelas satu (Eerste Klasse School) yang sudah mengajarkan bahasa Belanda kepada murid-murid. Pada 1909 Ia masuk Eerste Europesche Lagere School dan dapat diselesaikannya pada 1917. Untuk meningkatkan pengetahuannya Johannes melanjutkan ke School Met de Bijbel untuk memasuki HBS (Hogere Burger School) di Jakarta. Pendidikan di HBS dapat diselesaikannya pada 25 Mei 1923, kemudian Ia melanjutkan lagi ke Fakultas Hukum, Universitas Leiden dan selesai pada Juni 1927 dengan memperoleh gelar Meester in de Rechten. Johannes adalah putera Maluku pertama

yang meraih gelar Mr. di Universitas Leiden. Sepulang dari Belanda, Ia bekerja menjadi Ambtenaar ter Beschikking (pegawai yang diperbantukan) pada President Van De Raad Van Justitie (ketua pengadilan tinggi) di Surabaya pada 22 Desember 1927. Di situ Ia bekerja sampai 1 Maret 1929. Selain itu Johannes juga aktif dalam Sarekat Ambon (SA) dan pergerakan nasional. Ide-ide dan perspektif baru yang dibawanya dari Eropa dimasukkan ke dalam tubuh SA. Johannes juga menjadi pemimpin umum media SA "Haloean"



60. Mr. Johannes Latuharhary pada saat kunjungan kerja sebagai Gubernur Maluku di Maluku Timur

Atas prestasi kerjanya Johannes diangkat menjadi "Landrechter (Hakim)" di Surabaya, kemudian menjadi *grinier* pada Raad van Justitie. Kepercayaan pemerintah kepadanya dibuktikan dengan pengangkatannya sebagai Voorzitter van de Landraad (Ketua Pengadilan Negeri) di Kraksan (Jawa Timur) pada 1 Maret 1929. Setelah dua tahun bertugas, pada 26 September 1931 Johannes menikah dengan Heniete (Yet) Patty-Rajawane, Oleh karena Johannes aktif dalam organisasi pergerakan (SA). Ia memutuskan untuk berhenti sebagai ketua pengadilan dan tetap

tinggal di Kraksan sampai 1934. Karena kegiatan di organisasi pergerakan, Ia diangkat menjadi Regentschaapsraad (Dewan Perwakilan Kabupaten). Selanjutnya Ia pindah ke Malang dan menjadi anggota Provinciale Raad (Dewan Perwakilan Propinsi) Jawa Timur di Surabaya.

Selain itu Johannes juga merupakan anggota RegentSchaapraad Malang dan mengetuai Fraksi Nasional sampai Jepang masuk ke Indonesia. Pada saat pembentukan BPUKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan

Indonesia) Johannes menjadi anggota mewakili Maluku. Ia aktif mengikuti seluruh sidang dan banyak mengemukakan pendapat. Ketika tugas BPUPKI selesai dan dilanjutkan oleh PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) Johannes tetap diangkat menjadi anggota sehingga ia selalu mengikuti kegiatan dalam persiapan kemerdekaan RI seperti hadir pada saat Perumusan Naskah Proklamasi dan pembacaan proklamasi di Pegangsaan Timur No. 56. Ketika Indonesia merdeka, Johannes Latuharhary diangkat menjadi Gubernur Maluku yang pertama, di samping itu ia pun mejadi wakil ketua dalam KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat). Mr. Johannes Latuharhry meninggal pada 8 November 1959 dan 9 November jenazahnya dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata.



61. Johannes Latuharhary bersama Presiden Soekarno Di Maluku 1951



62. Tampak Mr. Johannes Latuharhary pada saat permulaan Konferensi Meja Bunder

## **Bandaneira: Terpenjara Raga, Kemerdekaan Akal (Profil Drs. Moh. Hatta)**

Mohammad Hatta merupakan satu dari dua tokoh legendaris Indonesia, yang disebut sebagai sang proklamator. Bersama Presiden Pertama Republik Indonesia Soekarno, pria yang akrab disapa Bung Hatta ini memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945.

Beliau adalah seorang pejuang, negarawan, dan juga Wakil Presiden Indonesia yang pertama. Hatta bersama Sukarno memainkan peranan penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia dari kolonialisme sekaligus memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia.

Jika Soekarno unggul di arena podium dengan orasi-orasinya yang menggugah, maka Hatta pun juga demikian, melalui sumbangan pemikirannya yang sangat brilian dan berharga, Hatta membuktikan diri sebagai generasi emas. Hatta adalah orator besar seperti halnya Soekarno, tapi bukan lewat pidato dengan suara bariton yang penuh wibawa, melainkan lewat tulisan-tulisannya yang tajam dan menggetarkan. Oleh karena itu, Hatta tidak gentar berpolemik dengan J.E. Stokvis, sosok terkenal dari Partai Sosial-Demokrat Belanda, mengenai perjuangan non-kooperasi. Hal itu mampu Hatta lakukan, karena ia bisa menguasai empat bahasa asing sekaligus. Kecerdasan dan gagasan Hatta yang brilian banyak mengundang decak kagum.

Berbeda dengan tulisan-tulisan Soekarno maupun Syahrir, rata-rata artikel Hatta tidak terlalu politis, dan lebih bersifat menganalisis serta mendidik pembaca. Ia juga banyak membahas pertarungan kekuasaan di Pasifik. Banyak tulisan Hatta menjadi bukti terpenting yang menggugurkan mitos di kalangan tentara bahwa militerlah yang paling berjasa memerdekakan Indonesia melalui perjuangan senjata. Mengikuti perjuangan tanpa kekerasan ala Mahatma Gandhi, ketajaman pena Hatta dan kekuatan analisisnya justru lebih digdaya daripada tembakan salvo manapun.

Akibat tulisan-tulisannya yang tajam mengkritik pemerintah kolonial, Hatta ditahan pada 1927. Saat menjabat ketua Perhimpunan Indonesia (PI) di Belanda kedua kalinya bersama dengan Ali Sastroamidjojo, Nazir Datuk Pamuntjak, dan Madjid Djojohadiningrat ditangkap pemerintah Belanda. Peristiwa ini terjadi pada 25 September 1927. Penangkapan Hatta bersama teman-temannya itu dilakukan Belanda atas tuduhan, bahwa Hatta telah mengikuti partai terlarang yakni PKI.

Berdasarkan tuduhan mengikuti PKI, akhirnya Hatta pun dihukum selama tiga tahun di penjara. Bahkan tak lama berselang muncul isu bahwa Hatta dan ketiga kawannya sengaja ingin melarikan diri. Praktis kondisi ini semakin membuat penguasa Belanda semakin murka.

Dia tidak surut. Hatta bersama Ali Sastroamidjojo, Nazir Datuk Pamuntjak dan Madjid Djojohadiningrat dipenjara di Rotterdam. Dari ruang penjara yang sempit, kala masih berstatus mahasiswa di Belanda, maka untuk membersihkan tuduhan Belanda yang tidak benar itu, Hatta kemudian melakukan pembelaan diri melalui sebuah pidatonya yang bertajuk *Indonesie Vrij* (Indonesia Merdeka), menjadi salah satu manifesto politik yang monumental. Disitulah, persis di ulu hati kekuasaan kolonial

dia menusukkan tikamannya. Dalam kesempatan itu, Hatta mendapat pembelaan dari 3 pengacara sekaligus. Diantaranya adalah J.E.W. Duys, yang tidak lain adalah anggota parlemen di Belanda.



**63. Bung Hatta, Cat Minyak di Kanvas, 100 x 80**  
Koleksi Museum Basoeki Abdullah

Setelah melewati beberapa fase persidangan yang sangat melelahkan, akhirnya Hatta dan ketiga sahabatnya dibebaskan oleh penguasa Belanda, karena telah terbukti bahwa Hatta dan sahabat sahabatnya tidak bersalah.

Dan kembali, akibat tulisan-tulisannya disitu untuk kedua kalinya Hatta ditangkap oleh pemerintah Hindia Belanda pada 25 Februari 1934, karena aktivitas pergerakannya di PNI-Baru. Pada minggu pertama Januari 1935 Hatta bersama empat teman lainnya dibuang ke Boven Digul, Irian sebuah wilayah pembuangan yang sering disebut Siberianya Hindia Belanda. Keempat sahabat Hatta itu antara lain adalah Syahrir, Bondan, Maskun dan Moerwoto.

Selama menjalani hukuman di Digul yang begitu ketat, Hatta tetap meluangkan kebiasaannya menulis. Banyak tulisan yang dihasilkan Hatta selama dibuang ke Digul. Tercatat tulisan-tulisannya banyak yang tersebar di surat kabar Jakarta. Tidak hanya itu, ia juga menulis untuk majalah-majalah di Medan. Semua itu dilakukan Hatta sebagai misi untuk tetap berperan aktif memperjuangkan tanah air dengan cara berbeda.

Bahkan akibat salah satu tulisannya yang dimuat di surat kabar "Pemandangan" di Jakarta, dimana isi tulisannya mengenai nasib orang-orang buangan mendapat perhatian dari Colijn, yang tak lain adalah salah satu menteri jajahan pada saat itu. Colijn kemudian mengecam pemerintah dan segera mengirim Residen Ambon untuk menemui Hatta di Digul. Oleh karena itulah pada akhir Desember 1935 atau awal Januari 1936, Hatta bersama Syahrir kemudian dipindahkan dari Digul menuju Banda Neira.

Di Banda Neira, sudah lebih dahulu dihuni oleh tahanan Iwa Koesoemasoemantri dan Tjipto Mangoenkoesoemo. Namun, pada 1939, Iwa Koesoemasoemantri bersama keluarganya kemudian dipindahkan ke Makasar. Setahun kemudian, Tjipto Mangoenkoesoemo menyusulnya.

Kehidupan Hatta semenjak dibuang ke Banda Neira relatif cukup mudah. Selain mendapat tunjangan yang lumayan, Banda Neira juga tidak seketat dan seterencil Digul. Disana relatif banyak penduduknya. Selama menetap di Banda Neira, Hatta menyewa sebuah rumah yang cukup besar. Alasannya, adalah agar bisa menampung buku-buku bacaannya yang jumlahnya banyak. Tidak kurang dia membawa 16 peti buku ke tanah pengasingan. Buku-buku itu membuatnya memiliki amunisi cukup untuk meluncurkan tulisan-tembakan salvonya ke koran-koran di Batavia maupun Den Haag.

Layaknya saat di pengasingan Digul, Hatta pun melakukan aktivitas yang hampir serupa dengan di Banda Neira. Dimana ia tetap menulis dan bercocok tanam. Bahkan selama di Banda Neira, ia menjadi salah satu kontributor tetap di sebuah surat kabar setempat bernama Sin Tit Po, Surat kabar ini dipimpin oleh seorang Tionghoa bernama Lim Koen Hian.

Selama ia menjadi kontributor tulisan di Sin Tit Po, ia mendapat honorarium sebesar f 75. Dan itu cukup untuk memenuhi kebutuhannya, ditambah dengan hasil cocok tanam. Selain itu, ia juga menulis untuk Nationale Commantaren dan koran Pemandangan. Inilah Hatta, sosok pejuang bangsa yang tetap bisa bertahan memperjuangkan bangsa di tengah tekanan kolonial sekalipun. Penjara dan pengasingan, tidak mampu membunuh dan mengkerangkeng gagasan-gagasan besar Hatta. Dia memang tidak bisa dibungkam.

Semakin ia dikekang, maka semakin besar pula gagasan yang dilahirkan. Demikian sosok Hatta dalam menyikapi hidup di masa pembuangan. Ia melakukan kiprah kebangsaannya melalui banyak ragam. Selain lewat tulisan, ia juga mengabdikan dirinya kepada rakyat dengan menjadi seorang pendidik. Hal ini ia buktikan tidak hanya saat berada di Digul, tetapi juga di Banda Neira.

Disana ia mengumpulkan beberapa pemuda kemudian mengajarkan banyak hal. Semua dilakukan Hatta sebagai upayanya untuk mencerdaskan anak bangsa.

Para pemuda yang sebelumnya buta terhadap buku, perlahan mulai menyukai buku. Pemuda yang sebelumnya tidak tahu sejarah, perlahan mengerti tentang sejarah. Inilah gerakan nyata dari Hatta, yang penuh antusias ingin mencerdaskan generasi muda kala itu.

Masa-masa Hatta hidup dalam pembuangan di Banda Neira tampaknya meninggalkan kenangan tersendiri bagi penduduk. Bahkan namanya diabadikan pada sebuah pulau di Kepulauan Banda yaitu Pulau Hatta. Pulau ini memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung di sana.

Sebagai *founding fathers*, kiprah Hatta untuk kemerdekaan Republik Indonesia sungguh sangat luar biasa besar. Bersama Soekarno, Hatta melakukan berbagai diplomasi kenegaraan untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Pada 17 Agustus 1945, Soekarno bersama Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sehari kemudian, secara aklamasi ia diangkat sebagai Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Oleh karena peran tersebut, maka keduanya disebut *dwitunggal*, Bapak Proklamator Indonesia.

Pada awal kemerdekaan itu Hatta juga terlibat dalam pergulatan politik yang diwarnai perpecahan di kalangan pendiri negara. Terpaksa menjadi perdana menteri setelah beberapa kali kabinet jatuh-bangun, Hatta harus menghadapi soal rumit: pemberontakan Madiun, agresi Belanda, diplomasi untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia dan pembentukan tentara nasional.

Salah satunya adalah terbitnya "Maklumat Wakil Presiden No. X", maklumat ini terbit dalam sidang KNIP yang pertama pada 16 Oktober 1945. Dalam sidang itu dibahas perlunya dibentuk Badan Pekerja KNIP. Usulan tersebut disampaikan kepada Wakil Presiden, yang kemudian mengeluarkan maklumat itu.

Kemudian atas usul Badan Pekerja KNIP kepada pemerintah, agar rakyat diberi kesempatan seluas luasnya untuk mendirikan partai politik, keluarlah Maklumat Pemerintah 3 November 1945. Maklumat tersebut ditanda tangani Wakil Presiden Moh Hatta.

Setelah kemerdekaan, Hatta lebih bertindak sebagai seorang "administratur", yang mencoba menerapkan pengalamannya yang luas ke alam nyata. Dia terlibat dalam penyusunan konstitusi dan menyumbangkan beberapa pasal penting, seperti "hak berkumpul dan berserikat" dan "penguasaan negara atas sumber daya alam", yang dua-duanya mencerminkan kepeduliannya pada kedaulatan rakyat serta kehidupan ekonomi mereka.

Hatta bukan tipe orang yang silau dengan kekuasaan yang dimilikinya. Bahkan secuilpun kekuasaan yang dimilikinya tidak pernah ia gunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Hatta memiliki sikap sederhana, jujur, santun dan hemat. Hidup beliau benar benar dibaktikan buat kepentingan bangsa dan negara. Penjara sudah tak terhitung berapa kali ia rasakan dalam memperjuangkan bangsa dan negara dari kekuasaan penjajah bersama Soekarno.



SKETSA REVOLUSI II  
(Dok. Museum Basoeki Abdullah)

## MENEGAKKAN NEGARA PROKLAMASI

### Kilasan Peristiwa 1945-1949: Menegakkan Negara Proklamasi

Perjalanan Indonesia untuk menjadi bangsa yang berdaulat penuh pasca proklamasi kemerdekaan tidak semudah yang diharapkan. Negara baru bernama Indonesia menghadapi berbagai macam persoalan dalam menyusun pemerintahan yang baru, baik persoalan yang berasal dari dalam maupun persoalan dari luar. Persoalan yang berasal dari luar salah satunya adalah keberadaan tentara Sekutu di Indonesia yang berdalih akan melakukan pemindahan tawanan perang APWI (Allied Prisoners of War and Internees). Namun, kedatangan tentara sekutu ini diboncengi oleh pihak NICA (*Netherlands-Indies Civil Administration*) yang ingin menjajah kembali Indonesia. Situasi politik menjadi memanas dan pertempuran untuk menegakkan kedaulatan RI kembali terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Di sisi lain, perjuangan melalui jalur diplomasi juga dilakukan untuk menunjukkan eksistensi negara Indonesia di tingkat Internasional.



**63. Peresmian penggantian Kabinet di Pegangsaan Timur 56 Jakarta 14 November 1945**

Pasca proklamasi kemerdekaan sistem pemerintahan berganti-ganti. Sistem Presidentil yang semula dianut kemudian berubah menjadi sistem parlementer pada awal November 1945. Perubahan sistem pemerintahan ini bermula pada sidang Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pertama yang berlangsung di Jakarta 16 Oktober 1945. Pada sidang tersebut Sutan Syahrir diminta duduk sebagai ketua Badan Pekerja KNIP. Saat itu, sebagian besar anggotanya mengusulkan perubahan fungsi KNIP dari badan pembantu Presiden menjadi lembaga legislatif. Hal itu didukung oleh Wakil Presiden Mohamad Hatta yang menerbitkan Maklumat Wakil Presiden No.X tentang pemberian kekuasaan legislatif kepada KNIP. Bersama Presiden KNIP juga ditetapkan ikut merumuskan Garis-garis Besar Haluan Negara. Pada 3 November 1945 diterbitkan Maklumat Pemerintah lainnya yang isinya antara lain, berdasarkan usul badan pekerja KNIP, bahwa Pemerintah memberi kesempatan pendirian partai-partai politik. Kemudian, sebagai ketua Badan Pekerja KNIP, Sutan Syahrir mengajukan maklumat KNIP No.5 11 November 1945 yang isinya pembentukan kabinet dengan susunan menteri yang bekerja kolektif yang dipimpin Perdana Menteri. Perdana Menteri ditunjuk oleh Kepala Negara. Pada 14 November 1945 terbentuk Kabinet R.I

### Kabinet Parlementer Pertama

kedua yang berbentuk kabinet ministerial dan sekaligus sebagai kabinet pertama dalam sistem parlementer dengan Sutan Syahrir sebagai Perdana Menteri.

## Yogya, Ibukota Pemerintahan RI



64. Perpindahan Ibukota 4 Januari 1946



65. Gedung Agung Yogyakarta, Kediaman Presiden Soekarno

ibukota dari Jakarta ke Yogya. Pada 4 Januari 1946 secara resmi Yogyakarta mejadi pusat pemerintahan dan Ibukota RI. Meskipun demikian, Perdana Menteri Syarir tetap berkantor di Jakarta untuk menjaga komunikasi dengan pihak internasional untuk kepentingan perjuangan.

## Kabinet Sjahrir II



66. Presiden Soekarno berpidato pada sidang KNIP ke III

Persatuan Perjuangan yang diketuai oleh Tan Malaka.

Jakarta sebagai ibu kota pemerintahan pasca proklamasi kemerdekaan ternyata menjadi wilayah yang keamanannya semakin tidak terkendali. Setiap hari terjadi pembunuhan atau penembakan yang dilakukan oleh tentara NICA (*Netherlands-Indies Civil Administration*) atas penduduk yang tidak bersalah.

Pengungsian mulai terjadi secara besar-besaran. Melihat kondisi tersebut Jakarta sebagai ibukota tidak mungkin dapat menjalankan fungsinya dengan lancar. Selain itu, kondisi keamanan yang tidak stabil tersebut dapat mengancam jiwa para pemimpin negara. Oleh karena itu, diputuskan untuk mencari wilayah yang relatif kondusif dari sisi keamanan agar roda pemerintahan dapat dijalankan dengan baik. Akhirnya, awal 1946 Pemerintah RI memutuskan untuk memindahkan

Adanya maklumat pemerintah 3 November 1945 mendorong berdirinya berbagai macam partai politik yang kemudian mengisi pos-pos menteri di Kabinet Sjahrir I. Namun, kebijakan pemerintahan RI yang lebih mengedepankan perundingan dengan pihak musuh menjadi bumerang. Banyak partai dan organisasi politik yang menganut "garis keras" tidak sepakat dengan kebijakan pemerintah RI tersebut. Pada awal 1946 mereka membangun oposisi untuk mengkritisi kebijakan pemerintah dengan nama

Persatuan Perjuangan dengan cepat menjelma menjadi oposisi yang menyerap banyak kekuatan massa. Akibat desakan oposisi Persatuan Perjuangan ini Kabinet Sjahrir akhirnya jatuh. Sutan Syahrir menyerahkan mandatnya sebagai Perdana Menteri kepada Presiden Soekarno pada 23 Februari 1946. Pada rapat pleno KNIP ke III 28 Februari 1946 di Solo secara resmi Kabinet Sjahrir bubar. Namun demikian, Presiden Soekarno kembali menunjuk Sutan Sjahrir untuk membentuk kabinet yang baru. Kabinet ini kemudian dinamakan Kabinet Sjahrir II.

## Konferensi Malino



67. Suasana Konferensi Malino

NICA-Belanda berusaha dengan segala cara melumpuhkan Republik Indonesia. Salah satu taktik yang digunakan oleh Belanda adalah menjalankan politik *divide et impera* atau politik memecah belah. Pada Juli 1946 suatu krisis terjadi dalam pemerintahan Republik Indonesia, keadaan ini dimanfaatkan oleh pihak Belanda yang telah menguasai sebelah Timur Nusantara. Untuk menjalankan siasatnya ini pada 15-25 Juli 1946 diadakan Konferensi Malino di bawah pimpinan Dr. HJ. Van Mook.

Van Mook berusaha menyusun negara-negara boneka yang telah diserahkan sekutu kepada Belanda dalam sebuah kerangka negara federal di bawah pimpinan Belanda. Rencana ini merupakan bagian upaya untuk merongrong kedaulatan Republik Indonesia.

## Perundingan Linggarjati



68. Pesanggrahan Linggarjati, tempat perundingan Indonesia-Belanda dilangsungkan

Masuknya Sekutu (Inggris) ke Indonesia yang diboncengi oleh NICA menyebabkan terjadinya konflik antara Indonesia dan Belanda. Konflik ini tidak jarang menimbulkan pertempuran di berbagai wilayah di Indonesia. Untuk mengatasi konflik bersenjata ini pemerintah RI membuka diri untuk berunding dengan pihak Belanda. Sir Archibald Clark Kerr, diplomat Inggris, mengundang Indonesia dan Belanda untuk berunding di Hooge Veluwe. Namun, perundingan tersebut gagal

karena Indonesia meminta Belanda mengakui kedaulatan atas Jawa, Sumatra dan Madura, sedangkan Belanda hanya mau mengakui Indonesia atas Jawa dan Madura.

Pada Agustus 1946, pemerintah Inggris kembali mengirimkan Lord Killearn ke Indonesia untuk menyelesaikan perundingan Indonesia dengan Belanda. Pada 7 Oktober 1946, bertempat di Konsulat Jenderal Inggris di Jakarta, dibukalah perundingan Indonesia-Belanda dipimpin Lord Killearn. Perundingan itu menghasilkan persetujuan gencatan senjata pada 14 Oktober 1946 dan meratakan jalan ke arah perundingan di Linggarjati yang dimulai pada 11 November 1946.

Perundingan Linggarjati dilaksanakan pada 11-15 November 1946 di Linggarjati, Cirebon. Dalam Perundingan Linggarjati dari wakil Indonesia adalah Sutan Syahrir sebagai ketua yang didampingi oleh Mr. Moh. Roem, Mr. Susanto Tirtoprojo dan A.K. Gani. Sedangkan di pihak Belanda adalah komisi Tim Jenderal yang terdiri dari Wim Schermerhorn sebagai ketua yang didampingi oleh H.J. Van Mook, Max Van Poll, dan F. de Baer. Mediator dalam perundingan ini adalah Lord Killlearn dari Inggris.

Dalam perundingan ini dihasilkan keputusan yang terdiri dari 17 pasal, antara lain berisi:

1. Belanda mengakui secara *de facto* Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatera, Jawa dan Madura.
2. Belanda harus meninggalkan daerah *de facto* paling lambat 1 Januari 1949
3. Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk Negara federal, dengan nama Republik Indonesia Serikat, yang salah satu Negara bagiannya adalah Republik Indonesia.
4. Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia-Belanda dengan Ratu Belanda selaku ketuanya.

Terjadi pro dan kontra mengenai Perjanjian Linggarjati, tetapi akhirnya Indonesia menandatangani perjanjian ini pada 25 Maret 1947 dengan alasan :

1. Adanya keyakinan bahwa bagaimanapun juga jalan damai merupakan jalan yang paling baik dan aman untuk mencapai tujuan Bangsa Indonesia.
2. Cara damai akan mendatangkan simpati dan dukungan internasional yang harus diperhitungkan oleh lawan.
3. Keadaan militer Indonesia yang masih lemah jika menyetujui perundingan memungkinkan Indonesia memperoleh kesempatan untuk memperkuat militer.
4. Jalan diplomasi dipandang sebagai jalan untuk memperjuangkan pengakuan kedaulatan dan penegakan Negara RI yang berdaulat.

Pengakuan secara *de facto* Belanda terhadap RI, meliputi wilayah Jawa, Madura dan Sumatera. Secara *de jure* (hukum) status hubungan Internasional Indonesia tidak jelas, tidak ada penegasan dalam perjanjian apakah Indonesia dapat melakukan hubungan internasional atau tidak. Terjalannya hubungan diplomasi dengan negara lain inilah yang memicu pertentangan lebih lanjut antara Indonesia-Belanda. Pertentangan antara Indonesia dengan Belanda akhirnya semakin memuncak. Pada akhirnya Belanda 20 Juli 1947 mengumumkan bahwa tidak terikat lagi terhadap perjanjian Linggarjati sehingga Belanda pada 21 Juli 1947 pukul 00.00 WIB melakukan aksi Agresi Militer Belanda. Peristiwa ini dikenal sebagai Agresi Militer Belanda I.

## Pembentukan dan Pembubaran Negara Indonesia Timur (NIT)



69. Suasana dalam Konferensi Denpasar

Sebelum Perjanjian Linggarjati ditandatangani, pihak Belanda melalui Dr. H. J. van Mook menjalankan strategi licik. Ia telah memaksa terwujudnya Negara Indonesia Timur melalui sebuah konferensi. Konferensi ini merupakan kelanjutan dari Konferensi Malino yang diadakan dari 7 Desember 1946 sampai 24 Januari 1947 di Denpasar-Bali. Konferensi ini kemudian terkenal dengan nama "Konferensi

Denpasar". Dalam konferensi itu Belanda berhasil memaksakan terwujudnya Negara Indonesia Timur (NIT). Ditunjuk sebagai Presiden NIT adalah Tjokorda Gde Sukawati Raka. Gagasan Dr. Van Mook untuk memecah belah Negara Indonesia akhirnya menjadi kenyataan.

NIT berdiri sampai 1950, dimana untuk mewujudkan kesatuan NKRI dan dibubarkannya RIS, maka NIT juga harus dilebur ke dalam kesatuan RI. Walaupun dalam proses peleburan, menimbulkan beberapa perdebatan untuk tetap mempertahankan bentuk federalisme di Indonesia Timur. Namun berdasarkan sidang istimewa yang dilakukan oleh anggota parlemen NIT, diputuskan untuk ikut bergabung ke dalam kesatuan NKRI untuk menuju kemerdekaan.

## Pembentukan Kabinet Amir Syarifudin

Kondisi keamanan menjadi tidak menentu pasca Agresi Militer Belanda I. Kondisi ini mendorong PM Sutan Sjahrir melakukan sidang istimewa. Pada 26 Juni 1947 akhirnya Kabinet Sjahrir III jatuh. PM Sutan Sjahrir mengembalikan mandatnya kepada Presiden pada hari itu jam 23.00.

Gentingnya situasi mendorong Presiden Soekarno memegang semua kekuasaan untuk sementara waktu sampai kabinet baru terbentuk. Pada 2 Juli Presiden Soekarno menunjuk Mr. Amir Sjarifudin, Dr. AK Gani dan Setiadjud untuk membentuk sebuah kabinet baru. Kabinet baru ini akhirnya terbentuk pada 3 Juli 1947 dengan Mr. Amir Sjarifudin sebagai Perdana Menteri dan Setiadjud sebagai wakilnya dan dilantik pada hari itu juga.



70. Dari kiri ke kanan Amir Sjarifudin, Dr. AK Gani, Setiadjud

## Perundingan Renville

Dewan Keamanan PBB, atas desakan Australia dan India, mengeluarkan perintah peletakan senjata 1 Agustus 1947. Langkah ini kemudian disusul dengan mendirikan suatu Komisi Jasa-Jasa Baik, yang lebih dikenal dengan nama Komisi Tiga Negara (KTN). Dalam menentukan keanggotaan KTN ini pihak Republik memilih Australia, sedangkan Belanda memilih Belgia. Kemudian Australia dan Belgia sama-sama memilih negara ketiga sebagai anggota KTN yaitu Amerika Serikat. Sesuai perintah dari Dewan Keamanan PBB, RI dan Belanda harus maju ke meja

perundingan dengan penengahnya adalah Komisi Tiga Negara (KTN). Tetapi, antara RI dan Belanda tidak menemui kata sepakat terkait tempat perundingan. Pada akhirnya KTN sebagai penengah mengusulkan untuk menggunakan sebuah kapal "Renville" sebagai tempat perundingan.

Perundingan Renville diadakan pada 8 Desember 1947-17 Januari 1948. Bagi perjuangan Republik Indonesia, Perjanjian Renville ini sangat merugikan dan ditentang oleh kalangan partai dan pemuda. Dalam perjanjian ini disebutkan bahwa pasukan gerilya RI yang berjuang di wilayah pendudukan Belanda harus dipindahkan ke wilayah Republik. Hal ini berarti daerah-daerah kosong yang baru ditinggalkan itu akan diserahkan mentah-mentah kepada Belanda.

### **Perundingan Kaliurang**

Selama Perundingan Renville berlangsung, delegasi Indonesia selalu berkonsultasi dengan Pemerintah Pusat di Yogyakarta, diantaranya masalah daerah kekuasaan Republik Indonesia. Untuk membicarakan masalah daerah kekuasaan RI tersebut pada 13 Januari 1948 berlokasi di Kaliurang diadakan perundingan antara KTN dan RI. Perundingan tersebut menghasilkan "Notulen Kaliurang" yang menyatakan bahwa RI tetap memegang kekuasaan atas daerah yang dikuasainya pada waktu itu.

### **Runtuhnya Kabinet Amir dan Naiknya Moh Hatta sebagai Perdana Menteri**

Kondisi politik dan ekonomi yang semakin sulit dalam menghadapi tekanan dan blokade Belanda, semakin dipersulit lagi dengan kondisi pertentangan-pertentangan di dalam negeri. Dua partai besar yaitu Masyumi dan PNI tidak menyetujui Perjanjian Renville dan menarik anggota-anggotanya dari kabinet. Maka, kondisi ini menyebabkan kabinet Amir Sjarifudin kehilangan legitimasi sehingga mendorong Amir Sjarifudin untuk meletakkan jabatannya pada 23 Januari 1948. Untuk menggantinya maka dibentuklah Kabinet Presidensiil pada 29 Januari 1948 Kabinet ini dipimpin Moh. Hatta sebagai Perdana Menteri.

### **Pemberontakan PKI di Madiun dan Agresi Militer Belanda Kedua**

Pada masa pemerintahan PM Moh. Hatta, pemerintah menghadapi tekanan yang luar biasa baik dari musuh maupun bangsa sendiri. Tekanan dari bangsa sendiri terhadap pemerintahan salah satunya dilakukan oleh Amir Sjarifudin. Setelah meletakkan jabatannya sebagai Perdana Menteri, Amir Sjarifudin memisahkan diri dari PSI pimpinan Sutan Sjahrir dan mendirikan Partai Sosialis yang lebih condong kepada komunis. Selain itu, Amir Sjarifudin sejak awal tidak menerima adanya kabinet yang dipimpin oleh Moh. Hatta.

Pada 26 Februari 1948 dalam sebuah pertemuan umum Amir Sjarifudin mempelopori berdirinya Front Demokrasi Rakyat (FDR) yang terdiri dari Partai Sosialis, Pesindo, Partai Buruh, SOBSI dan PKI. Melalui berbagai cara FDR berusaha memprovokasi dan menghasut rakyat Indonesia untuk menentang pemerintah.

Paham komunis yang dianut oleh FDR disebarkan secara masif hingga masuk ke dalam tubuh TNI.

Kondisi ini mendorong PM Hatta untuk melakukan kebijakan reorganisasi dan rasionalisasi di tubuh TNI. Kebijakan PM Hatta ini ditentang oleh FDR, sedangkan pasukan-pasukan TNI yang terkena rasionalisasi banyak yang membangkang dan memihak kepada FDR.

Kondisi politik dalam negeri semakin memanas. Pada 19 September 1948 FDR dan PKI di bawah pimpinan Amir Sjarifudin dan Muso mengumumkan berdirinya Pemerintah Sovyet Indonesia. Langkah ini dilanjutkan dengan aksi FDR/PKI merebut kota Madiun yang menggunakan beberapa ribu anggota satuan TNI yang memihak mereka. Kota Madiun kemudian dijadikan sebagai ibukota pemerintahan komunis mereka.

Menanggapi adanya pemberontakan ini Kabinet Hatta segera bersidang untuk menentukan sikap. Badan Pekerja KNIP menyetujui suatu undang-undang yang memberikan kekuasaan kepada Presiden Soekarno selama tiga bulan untuk mengadakan usaha penyelamatan negara Republik Indonesia. TNI kemudian bergerak mengerahkan kekuatan militernya untuk membebaskan Madiun yang jatuh ke tangan PKI.

Dalam waktu singkat TNI berhasil merebut Madiun dan memukul mundur satuan-satuan FDR/PKI. Pada hari ke-10 pasukan pertama dari Divisi Siliwangi berhasil membebaskan kota Madiun dan sekitarnya dari tangan pemberontak. Muso sebagai Pimpinan PKI akhirnya tertembak mati dalam sebuah pengepungan yang dilakukan oleh TNI pada 31 Oktober 1948 di Ponorogo. Mr. Amir Sjarifudin yang menjadi pimpinan FDR akhirnya tertangkap dan dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan Militer.



71. Tentara Belanda sedang bergerak memasuki Yogyakarta dalam Agresi Militer II

Tekanan terhadap pemerintah kembali muncul dari Belanda. Peristiwa bermula dari pihak bangsa Indonesia maupun pihak Belanda sama-sama mengirimkan surat kepada pihak KTN. Surat tersebut sama-sama berisi dugaan terhadap pihak Indonesia maupun pihak Belanda yang dianggap tidak menghormati

hasil perjanjian Renville. Akibatnya, sebelum tengah malam pada 18 Desember 1948, pihak Belanda mengumumkan bahwa Belanda tidak terikat lagi terhadap Perjanjian Renville. Tepat pada 19 Desember 1948, Belanda melakukan serangan terhadap Ibukota RI, Yogya. Pesawat tempur Belanda menyerang Bandara Maguwo dan sejumlah bangunan penting di Yogyakarta. Peristiwa tersebut merupakan awal dari Agresi Militer Belanda II.

Menghadapi situasi tersebut, Presiden Soekarno memberikan mandat kepada Mr. Sjafrudin Prawiranegara yang saat itu berada di Sumatera untuk membentuk Pemerintahan Darurat RI. TNI juga melakukan perlawanan dan mengundurkan diri ke luar kota. Kondisi ini dimanfaatkan oleh Belanda untuk menawan Presiden, Wakil Presiden dan beberapa menteri dan tokoh RI lainnya.

## Serangan Umum 1 Maret 1949



72. Para pimpinan pasukan yang menggempur Yogya saat Serangan Umum 1 Maret 1949, termasuk Letkol Soeharto.

Pada 1 Maret 1949 pukul 06.00 berdasarkan instruksi dari Panglima Besar pasukan TNI melancarkan serangan besar-besaran atas Kota YogYa yang diduduki Belanda. Dalam waktu singkat Belanda berhasil dipukul mundur dan meninggalkan pos-pos militernya. Beberapa persenjataan yang dimiliki Belanda berhasil direbut oleh tentara gerilya. Tepat jam 12.00 siang, muncul perintah untuk mengosongkan kota YogYa dan kembali menuju pangkalan gerilya.

Serangan Umum 1 Maret 1949 ini menjadi bukti kepada dunia internasional bahwa TNI masih ada dan memiliki kekuatan. Peristiwa ini sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan yang sedang berlangsung di Dewan Keamanan PBB yang menjadikan pihak Belanda menjadi terdesak.

## Perundingan Roem Royen

Belanda akhirnya menyadari bahwa Agresi Militer yang dilakukannya tidak memberikan manfaat apa-apa dan justru menjadikan perlawanan rakyat Indonesia semakin meluas di berbagai wilayah. Selain itu, pihak internasional melakukan tekanan kepada Belanda, terutama dari pihak Amerika Serikat juga mengancam akan menghentikan bantuannya kepada Belanda. Maka, tidak ada jalan lain selain mengikuti anjuran PBB untuk kembali ke meja perundingan.

Pada 7 Mei 1949 terjadi pertemuan antara Mr. Moh. Roem selaku wakil pemerintah RI dengan Mr. Royen selaku wakil dari Belanda menjadi jalan damai yang akan mengakhiri pertikaian Indonesia dengan Belanda. Dalam hasil perundingan tersebut disebutkan bahwa pihak Republik Indonesia bersedia untuk menghentikan serangan bersenjata dan ikut serta dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda.

Keikutsertaan pemerintah RI dalam perundingan selanjutnya bukan tanpa syarat. Pihak pemerintah RI menuntut agar Tentara Belanda ditarik terlebih dahulu dari wilayah Yogya dan mengosongkannya. Akhirnya Belanda menerima persyaratan tersebut. Pada 2 Juni 1949 pengosongan wilayah Yogya dimulai. Penarikan mundur tentara Belanda ini diawasi oleh opsir-opsir UNCI (United Nations Commissions for Indonesia).

## Konferensi Inter Indonesia



**73. Konferensi Inter Indonesia pertama di Yogyakarta 19-22 Juli 1949**

Dalam rangka menghadapi Konferensi Meja Bundar di Den Haag, muncul inisiatif untuk mempertemukan wakil-wakil Republik dengan wakil-wakil dari BFO (Bijeenkomst voor Federal Overleg) yang terdiri dari pimpinan negara-negara bagian yang ada di Indonesia.

Konferensi Inter Indonesia pertama berlangsung di Yogyakarta pada 19-22 Juli 1949 yang dipimpin oleh Wakil Presiden Drs. Moh Hatta. Hasil dari Konferensi Inter Indonesia pertama adalah:

1. Negara Indonesia Serikat disetujui dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS) berdasarkan demokrasi dan federalisme (serikat).
2. RIS akan dikepalai oleh seorang Presiden dibantu oleh menteri-menteri yang bertanggung jawab kepada Presiden.
3. RIS akan menerima penyerahan kedaulatan, baik dari Republik Indonesia maupun dari kerajaan Belanda.
4. Angkatan perang RIS adalah angkatan perang nasional dan Presiden RIS adalah Panglima Tertinggi Angkatan Perang RIS.
5. Pembentukan angkatan Perang RIS adalah semata-mata soal bangsa Indonesia sendiri. Angkatan Perang RIS akan dibentuk oleh Pemerintah RIS dengan inti dari TNI dan KNIL serta kesatuan-kesatuan Belanda lainnya.

Konferensi Inter Indonesia ini kemudian berlanjut di Jakarta pada 31 Juli – 2 Agustus 1949. Hasil dari konferensi kedua ini adalah sebagai berikut:

1. Bendera RIS adalah Sang Merah Putih.
2. Lagu kebangsaan Indonesia Raya.
3. Bahasa resmi RIS adalah Bahasa Indonesia.
4. Presiden RIS dipilih wakil RI dan BFO. Pengisian anggota MPRS diserahkan kepada kebijakan negara-negara bagian yang jumlahnya enam belas negara. Kedua delegasi juga setuju untuk membentuk panitia persiapan nasional yang bertugas mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan Konferensi Meja Bundar.

Dampak dari Konferensi Inter-Indonesia adalah adanya konsensus yang dibangun melalui Konferensi Intern-Indonesia yang menjadi modal berharga bagi pemerintah RI, terutama delegasi Indonesia yang ditunjuk untuk berunding dengan

Belanda pada Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag. Keberadaan BFO dan sikap tegas Gde Agung untuk menolak intervensi Belanda membuat pemerintah Indonesia memiliki legitimasi yang makin kuat untuk berunding dengan Belanda di KMB.

## Konferensi Meja Bundar (KMB)



74. Konferensi Meja Bundar

Pasca Konferensi Inter Indonesia, wakil-wakil RI yang dipimpin oleh Drs. Moh. Hatta dan wakil BFO yang dipimpin oleh Sultan Hamid berangkat ke Den Haag mengikuti KMB. Delegasi dari Belanda diwakili oleh Dr. Marseveen, sedangkan dari pihak PBB diwakili oleh Crichtley. Konferensi ini diadakan pada 23 Agustus-2 November 1949. Hasil dari konferensi ini adalah:

1. Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat (RIS) sebagai sebuah negara yang merdeka.
2. Status Provinsi Irian Barat diselesaikan paling lama dalam waktu setahun, sesudah pengakuan kedaulatan.
3. Dibentuknya Uni Indonesia-Belanda untuk bekerja sama dengan status sukarela dan sederajat.
4. Republik Indonesia Serikat akan mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak-hak konsesi serta izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda.
5. Republik Indonesia Serikat harus membayar semua utang Belanda dari 1942.

Adanya hasil dari KMB ini sesungguhnya menyeleweng dari amanat Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan Undang-Undang Dasar 1945 karena salah satu hasilnya menyebutkan pembentukan negara Republik Indonesia Serikat. Tetapi, pemerintah menegaskan bahwa KMB merupakan batu loncatan ke arah cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia.

## Pengakuan Kedaulatan



75. Upacara penandatanganan pengakuan kedaulatan di Jakarta 27 Desember 1949

Pada 23 Desember 1949 delegasi RIS yang dipimpin Drs. Moh. Hatta berangkat ke Belanda untuk menandatangani naskah kedaulatan dari pemerintah Belanda. Upacara penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan dilakukan pada waktu yang bersamaan di Indonesia dan di Belanda 27 Desember 1949.

Di negeri Belanda Ratu Juliana, Perdana Menteri Dr. Willem Drees, Menteri Seberang Lautan Mr. A.M.J.A. Sassen dan Ketua Delegasi RIS Drs. Moh. Hatta membubuhkan tandatangannya pada naskah kedaulatan tersebut. Di Jakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Wakil Tinggi Mahkota A.H.J Lovink dalam suatu upacara bersama-sama membubuhkan tanda tangannya pada naskah penyerahan kekuasaan.

## **Pembentukan dan Pembubaran Republik Maluku Selatan (RMS)**

Upaya Belanda mempertahankan kekuasaannya terjadi di Indonesia bagian Timur yaitu di Maluku dan Irian Jaya. Berbagai alasan diprovokasikan untuk menentang Republik Indonesia dan menolak kedatangan TNI/APRIS. Kegelisahan penduduk dan para ex KNIL dimanfaatkan oleh Belanda untuk memprovokasi berdirinya Negara Maluku yang merdeka.



76. Kiri-Pendaratan pertama TNI-APRIS di Maluku. Kanan-Dr Soumokil tokoh RMS

RMS adalah daerah yang diproklamasikan merdeka pada 25 April 1950 dengan maksud untuk memisahkan diri dari Negara Indonesia Timur. RMS didirikan oleh orang-orang bekas prajurit KNIL dan pro-Belanda yang diantaranya adalah Chr. Soumokil bekas jaksa agung Negara Indonesia Timur yang kemudian ditunjuk sebagai Presiden, Ir. J.A. Manusama dan J.H. Manuhutu. Pemerintah Pusat menganggap bahwa RMS merupakan gerakan pemberontakan. Untuk itu, pemerintah RIS melakukan misi damai dengan mengirimkan tiga orang tokoh masyarakat Maluku yaitu Dr. J. Leimena, Dr. Rehatta, dan Ir. Putuhena. Ketiganya diminta untuk berunding dengan pimpinan RMS yaitu Ir. Manusama dan Soumokil. Tetapi, RMS tidak menganggap utusan RIS ini. Maka, setelah misi damai gagal, RMS ditumpas tuntas pada November 1950 dengan kekuatan militer.

## **Kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)**

KNIP awalnya sulit menerima hasil-hasil dari KMB. Hal ini karena KMB dengan RISnya bertentangan dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sementara itu, tuntutan dari rakyat di berbagai daerah datang silih berganti. Karena desakan rakyat saat itu, satu demi satu negara-negara buatan Belanda akhirnya jatuh. Konstitusi RIS akhirnya membuka kesempatan untuk membentuk Negara Kesatuan

sesuai dengan keinginan rakyat Indonesia. Maka, pada 19 Mei 1950 tercapai persetujuan antara RI dan RIS untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

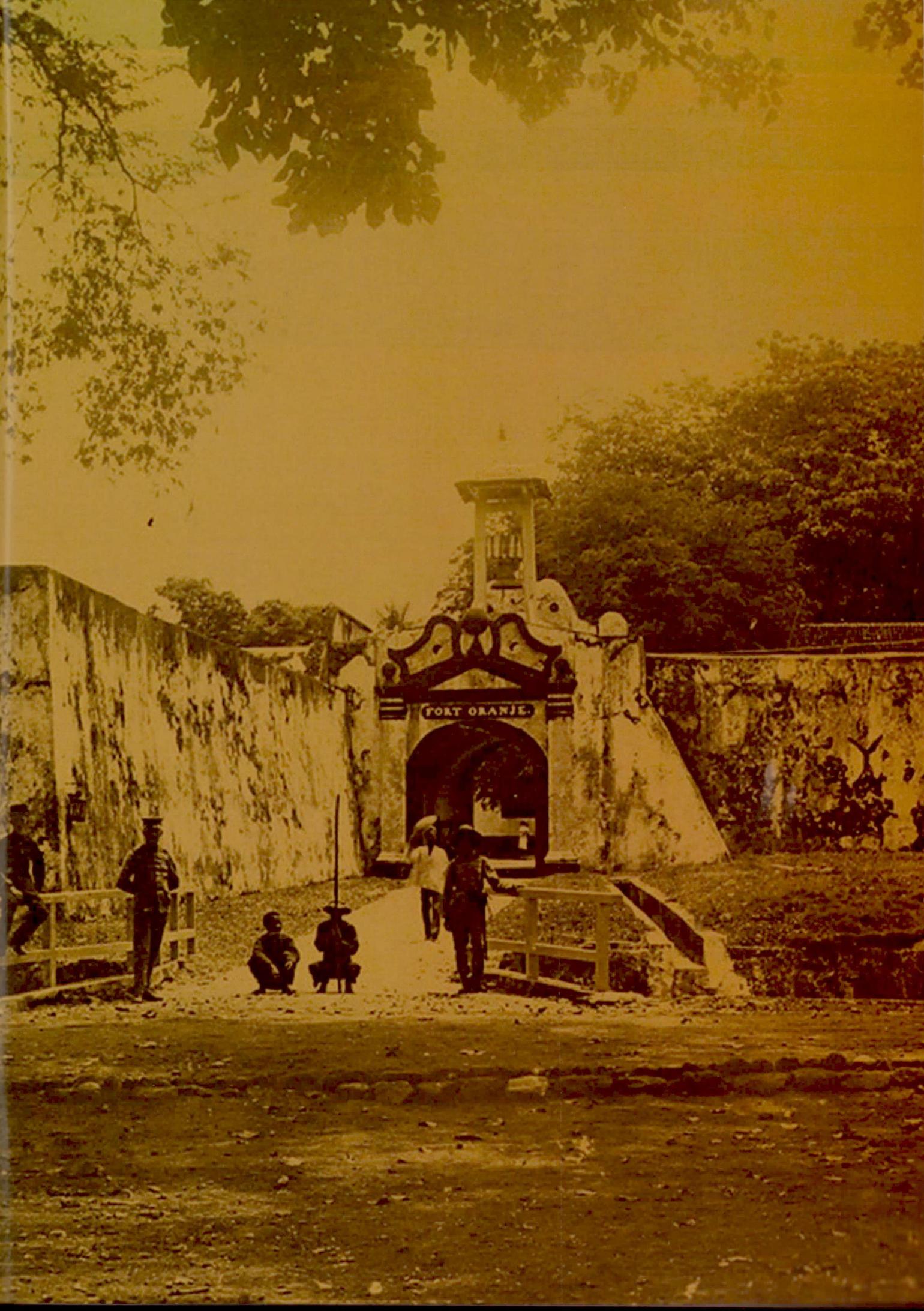
Langkah menuju NKRI tersebut ditempuh melalui pengesahan Rancangan Konstitusi Negara Kesatuan RI oleh Badan Pekerja KNIP di Yogya dan oleh Senat serta DPR di Jakarta. Kemudian dinyatakan bahwa Negara Kesatuan RI ditetapkan 17 Agustus 1950. Langkah berikutnya adalah penyerahan mandat Mr. Assaat selaku pemangku jabatan Presiden RI dan Moh. Hatta selaku PM RIS kepada Presiden Soekarno. Maka, pada akhirnya Presiden Soekarno dan Moh. Hatta dilantik kembali sebagai Presiden dan Wakil Presiden Negara Kesatuan RI.

## **Kunjungan Soekarno ke Maluku**

Pada 4 November 1958, Kapal Mangkara dan Djadayat yang dikawal oleh sejumlah kapal perang merapat di Saumlaki, ibu kota Maluku Tenggara Barat, Maluku. Presiden Soekarno waktu itu berkunjung ke Saumlaki untuk pertama kalinya. Saat itu, Presiden Soekarno membawa serta sejumlah duta besar negara lain, seperti Duta Besar Negara Arab Persatuan, Republik Rakyat Tiongkok, Filipina, Pakistan, Turki, Amerika Serikat, Jepang, Kanada, Uni Soviet, Hongaria dan Irak. Ikut pula wartawan luar negeri dari Amerika Serikat, Uni Soviet, Tiongkok dan juga wartawan-wartawan dalam negeri.

Pada 1958 itu, di hadapan masyarakat Saumlaki dan tamu asing yang dibawanya, Soekarno pun berpidato, menegaskan kedaulatan Indonesia yang saat itu sudah 13 tahun merdeka. "Saudara-saudara, kadang-kadang masih ada orang-orang yang memakai perkataan penyerahan kedaulatan. Pada 17 Agustus 1945 kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Kemudian di dalam bentuk Republik Indonesia kita kembali dicoba oleh pihak Belanda untuk digempur. Namun usaha mereka mengalami kegagalan dan akhirnya pada 27 Desember 1949 mereka mengakui kedaulatan kita. Dengarkan perkataan Bapak, mengakui kedaulatan kita," ujar Soekarno dalam pidatonya.

Presiden Soekarno juga menyinggung soal Irian Barat (Papua) yang saat itu masih dikuasai Belanda. "Wilayah Republik Indonesia adalah seluruh kepulauan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jadi salah jikalau dikatakan bahwa kita harus mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia. Irian Barat sudah di dalam wilayah Republik Indonesia," tuturnya





**PESERTA PAMERAN**

Museum Nasional Indonesia | Museum Kebangkitan Nasional | Museum Sumpah Pemuda  
Museum Perumusan Naskah Proklamasi | Museum Benteng Vredeborg  
Museum Kepresidenan Balai Kirti | Museum Basoeki Abdullah

**DIDUKUNG OLEH**

Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman | Balai Pelestarian Cagar Budaya Maluku Utara